

# LAPORAN PENELITIAN

## ANALISIS POTENSI PEMBANGUNAN DESA SUKOHARJO

(Studi Terhadap Desa Tertinggal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP-PADANG	
DITERIMA TGL. :	24 SEP 1997
SUMBER / HARGA :	H. 1
KOLEKSI :	K
NO. INVENTARIS :	1625/K/97-2(12)
NO. KOTAK :	307.72 HAS

Oleh :

Drs. Hasanuddin, MS.  
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang

Tahun Anggaran 1995 / 1996

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 56/PT37.H8/N.1.4.2/1995

Tanggal : 7 - 8 - 1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

---

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1996

# **ANALISIS POTENSI PEMBANGUNAN DESA SUKOHARJO**

**(Studi Terhadap Desa Tertinggal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)**

## **PERSONALIA PENELITIAN**

**Konsultan** : Drs. Kumaidi, MA, Ph.D.  
Drs. Syafnil Effendi, SH.

**Ketua Pelaksana** : Drs. Hasanuddin, MS.

**Anggota** : Drs. H a s r u l

## A B S T R A K

### HASANUDDIN, Analisis Potensi Pembangunan Desa Sukoharjo (Studi Terhadap Desa Tertinggal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok).

Dewasa ini upaya-upaya pengentasan kemiskinan mendapat perhatian khusus, karena setelah perjalanan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Pertama berakhir ternyata didapati sekitar 27 juta jiwa penduduk Indonesia masih diterpa dan digeluti oleh badai dan prahara kemiskinan serta keterbelakangan. Sebahagian besar diantara mereka hidup dan bermukim di daerah pedesaan, terutama pada wilayah desa-desa miskin, terpencil dan terisolasi atau dikenal dengan istilah populer "Desa Tertinggal". Berbagai literatur menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan dan ketertinggalan ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dan datang dari masyarakat) serta faktor eksternal (dampak dari lingkungan yang berinteraksi dengan masyarakat) misalnya menyangkut hal kualitas dan potensi sumberdaya wilayah.

Studi ini mencoba untuk mengungkapkan segi kekayaan desa yang dikelompokkan ke dalam sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial, usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat serta kondisi infrastruktur yang ada sebagai gambaran nyata potensi pembangunan dan kemampuan produksi yang dimiliki ataupun cerminan dari karakteristik dan potensi sumberdaya wilayah desa, khususnya kasus Desa Sukoharjo. Penelitian ini sekaligus juga untuk menjaring dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan serta kendala pengembangan desa tersebut ditinjau dari sisi kualitas dan potensi sumberdaya ataupun dari aspek pola pemanfaatan dan pengelolaannya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Metoda penelitian yang digunakan bersifat studi regional berdasarkan pendekatan survey dengan teknik pengumpulan data melalui pencatatan dokumen, pengamatan dan wawancara terfokus serta dibarengi dengan refleksi partisipatif dari sejumlah warga desa. Kemudian data yang telah terhimpun diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa ini memiliki keragaman dan potensi sumberdaya wilayah yang dapat dijadikan faktor pendukung dan pendorong pembangunan desa bersangkutan serta memacu perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah potensi di bidang usaha tani padi sawah dan usaha berkebun kopi dan tanaman kulit manis. Di samping itu, potensi yang ada juga relatif sesuai bagi pengembangan usaha atau budidaya perikanan dan beternak itik. Dari segi produksi (output) desa ini cukup memberi kontribusi terhadap total hasil tanaman pangan dan perkebunan di tingkat Kecamatan, khususnya produksi padi dan komoditas kopi dan kulit manis.

Kemudian, temuan penelitian juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi desa yang sekaligus dipandang sebagai faktor penyebab ketertinggalannya. Permasalahan ataupun kendala pembangunan dimaksud antara lain yaitu, rendahnya tingkat produktivitas hasil usaha tani dan produksi tanaman perkebunan dan pekarangan, belum berkembangnya bidang usaha perikanan dan peternakan, sarana dan prasarana penyuluhan yang belum memadai, organisasi dan kelembagaan pedesaan yang belum berkembang, prasarana jalan dan transportasi kurang memadai, terbatasnya tenaga guru SD, partisipasi pendidikan rendah, relatif banyak tingkat buta huruf dikalangan warga.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini diperlukan beberapa alternatif program penanggulangan ataupun kebijaksanaan yang mengarah pada strategi peningkatan produktivitas usaha tani padi sawah dan produksi hasil tanaman perkebunan (pilihan komoditas kopi dan kulit manis), strategi diversifikasi usaha terutama pemanfaatan lahan pekerangan, tegalan dan sumberdaya air. Kegiatan tersebut hendaknya diiringi dengan upaya pembinaan dan bimbingan pada anggota masyarakat, pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana penyuluhan serta kelembagaan pedesaan, bantuan bibit dan pemodalan. Di samping itu juga diperlukan peningkatan dan perbaikan sarana jalan serta pengadaan sarana penerangan (listrik desa).

Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan formal diperlukan dengan segera penambahan tenaga guru SD dan upaya peningkatan kualitas tenaga guru yang ada. Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu suatu strategi untuk mengaktifkan program kerja paket A setara SD dan B setara SMP sehingga program Wajib Belajar 9 tahun dapat dilaksanakan, dengan menyisipkan materi keterampilan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi wilayah.

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKIP Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Lembaga Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana IKIP Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Saya menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian IKIP Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing". Kemudian diseminarkan yang melibatkan dosen senior dan tim Kredit Point IKIP Padang untuk

tujuan diseminasi. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian, Dosen Senior dan anggota tim Kredit Point IKIP Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terimakasih kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Maret 1996

Ketua Lembaga Penelitian  
IKIP Padang



Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D  
NIP 130 605 231

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi karena berkat rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penelitian ini berjudul Analisis Potensi Pembangunan Desa Sukoharjo - Studi Terhadap Desa Tertinggal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang potensi desa tersebut dan sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab ketertinggalannya.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyelesaian penelitian tersebut tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada tempatnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Kumaidi, MA, Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian IKIP Padang dan sekaligus sebagai Konsultan.
2. Bapak Drs. Syafnil Effendi, SH. selaku Konsultan dan Mantan Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP Padang.
3. Bapak-bapak Dosen Senior dan Panitia Kredit Point IKIP Padang, yang telah meluangkan waktu dan memberi sumbang sarannya demi peningkatan kualitas hasilnya.
4. Rekan-rekan sejawat yang telah ikut menyumbangkan pikiran. demi kesempurnaan isinya.
5. Bapak Camat dan Dinas Instansi di Kecamatan Sangir serta masyarakat desa Sukoharjo yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Mudah-mudahan segala bantuan dan diberikan mendapat imbalan setimpal dari yang Maha Kuasa, dan besar harapan kami hasil penelitian ini ada manfaatnya bagi kita semua, Amien !!

Padang, Februari 1996  
Peneliti,



## DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
ABSTRAK .....	i
PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Problema Kemiskinan dan Faktor yang Perlu diperhatikan .....	12
B. Pembangunan Untuk Mengatasi Kemiskinan ..	14
C. Acuan Dasar Analisis Potensi Desa .....	16
D. Sumberdaya Dalam Pembangunan dan Proses Produksi .....	20
III. METODOLOGI PENELITIAN .....	32
A. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	32
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Peubah Penelitian .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Karakteristik dan Potensi Sumberdaya Wilayah Desa Sukoharjo .....	37
B. Potensi Desa dan Pola Usaha Masyarakat ..	76
C. Penyebab Ketertinggalan Desa Sukoharjo ..	96
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Implikasi Kebijakan .....	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah umat manusia ternyata diketahui lebih banyak orang yang lapar di dunia saat ini dari pada masa lalu dan jumlah mereka buat sementara akan semakin bertambah. Kendatipun secara persentase jumlah tersebut memang sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya namun secara absolut angkanya justru menjadi lebih besar. Dari laporan Bank Dunia tahun 1986 meramalkan, bahwa angka-angka itu cenderung akan bertambah.

Kemudian dari pada itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dialami hampir di sebahagian besar negara Dunia Ketiga, kelihatannya belum lagi dapat menjadi jaminan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, urbanisasi desa ke kota, dan kesenjangan antara kemajuan kota dan desa. Bahkan diduga bahwa akibat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab ketimpangan dan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Meskipun Indonesia telah memperlihatkan hasil dan kemajuan dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan, apakah itu dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin maupun peningkatan pendapatan rata-rata penduduknya, tidaklah berarti bahwa kemiskinan dan ketertinggalan tersebut sudah bukan masalah yang harus mendapat perhatian serius.

Antara periode tahun tujuh puluhan dan tahun delapan puluhan Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah golongan penduduk miskin dari 60% menjadi kurang dari 20% total seluruh populasi. Bila angka ini dihubungkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1990 dimana total penduduk Indonesia berjumlah 179,3 juta jiwa berarti sekitar 35,9 juta jiwa masih berada dalam kemiskinan. Suatu jumlah yang relatif besar dan menuntut perhatian serta usaha yang bersungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk dapat menanggulangnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, pakar ekonomi Adam Smith pernah mengemukakan bahwa tidak ada masyarakat yang dapat maju dan berbahagia di tengah-tengah sebahagian besar penduduknya berada dalam keadaan miskin dan menyedihkan. Kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan sungguh mengerikan. Tak seorang pun mengerti mengapa keadaan begini hanya tinggal angka-angka yang menunjukkan rendahnya pendapatan, buruknya rumah, terlalu awalnya kematian dan kerapnya menganggur. Pengamat yang bertenggang rasa dapat berbicara secara objektif tentang keterbelakangan hanya, setelah ia secara pribadi atau seolah-olah secara pribadi mengalami sendiri prahara kemiskinan dan keterbelakangan serta belenggu ketertinggalan. Prahara dan badai budaya ini terjadi pada seseorang ketika ia menghayati perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang-orang miskin serta terbelakang, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan tuna segala-galanya. Goncangannya akan dirasakan pada saat ia

menyadari bahwa kehidupannya tidak manusiawi dan sama sekali tidak terbayangkan.

Menurut Denis Goulet (1972) emosi keterbelakangan itu adalah sebuah perasaan impotensi masyarakat dan perseorangan terhadap penyakit dan kematian, terhadap kebingungan dan kebodohan ketika seseorang meraba-raba untuk mengerti perubahan, terhadap keputusan dihadapan kelaparan dan bencana alam. Kemiskinan yang kronis adalah sejenis neraka yang kejam dan orang tak akan mengerti betapa bengisnya neraka tersebut apabila hanya mengamati kemiskinan sebagai suatu objek.

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan bukanlah merupakan satu masalah seperti halnya persoalan energi ataupun polusi, yaitu tidak ada satu masalah kemiskinan akan tetapi yang ada justru adalah beratur-ratus bahkan beribu-ribu persoalan kemiskinan, yang bervariasi dari setiap pengambil keputusan, juga akan bervariasi dari suatu periode ke periode waktu lainnya ataupun dari suatu tempat ke tempat yang lain. Agar permasalahan menjadi bersifat "researchable" maka dari beragam persoalan kemiskinan itu perlu dilakukan pengelompokan.

Dalam penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan di suatu wilayah, yang menjadi pusat perhatian adalah tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Meskipun demikian dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan mungkin terlepas dari aspek lingkungan tempat masyarakat

tersebut berada, sebab persoalan kemiskinan dan ketertinggalan itu ada yang bersumber dari masyarakat itu sendiri (faktor internal) seperti, rendahnya tingkat pengetahuan, pendidikan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan dan buruknya kondisi keluarga mereka. Sebaliknya ada pula kemiskinan yang bersumber dari lingkungan yang berinteraksi dengan masyarakat (faktor eksternal) seperti terbatasnya pasar untuk produk-produk yang mereka hasilkan, buruknya sarana dan prasarana perhubungan, rendahnya aksesibilitas terhadap modal, kualitas dan kemampuan sumberdaya alam yang rendah, teknologi yang sangat terbatas serta faktor kelembagaan yang tidak mendukung (favourable).

Terhadap penyebab yang beragam tersebut perlu diklasifikasikan kategori sehingga ada suatu kerangka acuan yang menjadikan problema kemiskinan dan ketertinggalan itu dimungkinkan untuk ditelaah. Sebagaimana dikemukakan oleh Djojohadikusumo (1989) bahwa pemantauan, pengkajian dan penilaian terhadap perkembangan keadaan (termasuk kemiskinan dan ketertinggalan), harus dilakukan dalam suatu kerangka acuan (frame of reference) yang secara jelas dan eksplisit mengungkapkan tolok ukur dalam telaahannya.

Kemudian daripada itu, perlu pula untuk dipahami bahwa permasalahan kemiskinan atau ketertinggalan ini adalah masalah yang spesifik menurut ruang, waktu, budaya dan pengambil keputusan (decision maker). Oleh karena itu, orientasi metodologi untuk penanggulangan-

nya haruslah bersifat elektik (electic) dengan memanfaatkan keunggulan dari masing-masing metodologi penelitian yang ada.

Suatu studi yang mencoba untuk memenuhi kreteria tersebut telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, dengan mempergunakan suatu indeks yang menggambarkan derajat kemiskinan kemudian memetakannya menurut propinsi yang ada di Indonesia. Indeks derajat kemiskinan ini merupakan penggabungan dari tiga buah Indikator, yaitu (1) pendapatan perkapita, (2) status gizi, dan (3) indeks mutu hidup (PQLI). Bersamaan dengan hasil penelitian tersebut juga dihasilkan preskripsi untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Namun demikian, agar preskripsi yang dihasilkan itu benar-benar dapat mengenai sasarannya maka dalam mengaplikasikannya pada daerah tertentu diperlukan modifikasi dan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kondisi fisik atau potensi wilayahnya.

Berdasarkan kreteria dan ketentuan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat mengklasifikasikan sejumlah desa miskin di daerah ini, yang populer dengan sebutan sebagai desa tertinggal. Salah satu diantaranya yaitu Desa Sukoharjo, yang berada dalam wilayah Kecamatan Sangir di Kabupaten Solok. Selain disebabkan karena letaknya yang relatif jauh dari kota Padang dan kota Solok sebagai ibu kota Kabupaten, desa tersebut termasuk lingkup wilayah kecamatan di

bahagian sebelah selatan daerah Kabupaten Solok yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi. Dibandingkan dengan desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan bersangkutan, selintas tergambar kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Sukoharjo tersebut relatif belum berkembang.

Dalam kaitannya dengan pokok persoalan di atas, kiranya perlu dilakukan suatu studi sebagai tindak lanjut (follow up) terhadap studi ataupun keputusan yang telah terdahulu dilakukan, dengan maksud supaya preskripsi yang telah dihasilkan dapat bersifat "workable". Untuk itu melalui penelitian ini dicoba dilakukan studi regional dan eksplorasi mengenai karakteristik wilayah bersangkutan guna dapat mengetahui potensi pembangunan desa tersebut dan sekaligus akan diketahui bagaimana profil aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah desa bersangkutan serta faktor-faktor penyebab ketertinggalan wilayah desa ini. Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan bakal dapat dirakit suatu strategi regional yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan atau ketertinggalan desa tersebut, khususnya untuk dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Desa Terpadu (RPDT) kasus desa tertinggal Sukoharjo sebagai salah satu desa binaan antara IKIP Padang dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

## **B. Perumusan Masalah**

Perhatian terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari pemerintah dan berbagai pihak dalam masyarakat Indonesia akhir-akhir ini semakin besar. Hal ini memang sudah menjadi tekad sejak dicetuskannya pembangunan Indonesia selama beberapa Pelita yang berlangsung dari awal tahun 1969 dengan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walau pertumbuhan ekonomi berhasil diwujudkan secara nyata namun masalah kemiskinan sampai selesainya pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap pertama, masih menyangkut sejumlah besar penduduk Indonesia dan beberapa wilayah yang lamban dan tertinggal di dalam pembangunan.

Pengertian dan penyebab kemiskinan itu sendiri sering menjadi bahan perdebatan, karena ia dapat merupakan atau bersifat kemiskinan absolut ataupun kemiskinan relatif serta dapat pula diartikan secara sempit ataupun secara luas. Kendatipun demikian semua sepakat bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang tidak memuaskan ataupun kondisi yang tidak diinginkan. Para peneliti mungkin bertolak dari indikator lokal sesuai dengan pemahaman dan persepsi masyarakat setempat dimana mereka berada. Begitu pula para pemimpin lokal baik formal maupun informal pada umumnya mampu mengidentifikasi kemiskinan yang terdapat diwilayahnya. Sementara itu, para pembuat kebijakan dan para praktisi



mengendaki adanya indikator-indikator yang berlaku umum yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang perlu diambil dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan perhatian terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan, berkembang pula pembahasan terhadap fenomena-fenomena kemiskinan, dan metodologi untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok miskin atau tertinggal. Tinjauan terhadap berbagai fenomena tersebut antara lain akan menyangkut faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan pemiskinan, indikator-indikator dalam pemahaman gejala serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan utama yang berjangka panjang dalam mengatasi persoalan tersebut bagaimanapun menurut Kasryno (1985) pemikiran, strategi dan tindakan yang dilakukan harus dibimbing oleh pengakuan atas faktor-faktor penentu atau penunjang (potensi) yang dimiliki oleh desa ataupun masyarakat desa bersangkutan. Secara umum Sajogyo dan Pudjiwati (1983) mengemukakan bahwa komponen-komponen potensi desa yang pada dasarnya adalah meliputi unsur-unsur, alam, lingkungan hidup manusia, penduduk, usaha-usaha manusia, prasarana dan sarana yang telah dibuat.

Kemudian daripada itu, perkembangan suatu desa juga dipengaruhi oleh faktor hasil karya manusia dan faktor sosial budaya. Oleh Kuntjaraningrat (1969) disimpulkan bahwa secara garis besarnya faktor pembangunan

masyarakat desa terdiri dari faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Jadi, dengan demikian semua faktor dan potensi-potensi desa tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pembangunan pedesaan.

Bertolak dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana potensi pembangunan desa Sukoharjo dan faktor apakah yang menjadi penyebab ketertinggalannya.

Agar supaya permasalahan ini dapat bersifat operasional dan benar-benar dapat diteliti (researchable) maka pokok persoalan dapat dispesifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi ataupun karakteristik sumber daya wilayah desa Sukoharjo, bilamana ditelusuri dari sisi kekayaan desa (resource endowment) yang dikelompokkan dalam bentuk sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan.
2. Bagaimana gambaran potensi ataupun produksi (ouput) desa tersebut jika dipelajari dari segi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat desa bersangkutan.
3. Faktor-faktor apa yang diperkirakan menjadi penyebab ketertinggalan wilayah desa ini, bilamana ditinjau dari sisi kekayaan ataupun potensi desa tersebut.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai potensi pembangunan desa Sukoharjo di Kecamatan Sangir dan sekaligus diketahuinya faktor-faktor penyebab ketertinggalannya.

Agar supaya lebih spesifik maka tujuan di atas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

1. Terdapatnya informasi atau gambaran mengenai karakteristik wilayah desa Sukoharjo, yang mencakup potensi sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial ataupun kelembagaan serta fasilitas dan pelayanan sosial (infrastruktur) yang dimiliki oleh desa bersangkutan.
2. Diperolehnya gambaran tentang keadaan potensi desa dan bentuk-bentuk aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya menyangkut bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Ditemukannya sejumlah faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa Sukoharjo dalam kaitannya dengan potensi sumberdaya wilayah dan keragaman pola usaha ataupun kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
4. Tersusun dan tergambarnya sejumlah alternatif program untuk penanggulangan penyebab ketertinggalan desa ataupun persoalan dan kendala yang dihadapi masyarakat selama ini.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Diharapkan dengan tersedianya informasi awal dan data dasar sebagai hasil dari penelitian ini akan dapat bermanfaat atau berguna bagi para perencana (planner) di dalam mempelajari lebih lanjut tentang persoalan-persoalan pembangunan dan kemiskinan masyarakat di wilayah desa Sukoharjo. Sehingga perantaraan data dasar yang terorganisir itu bakal dapat membantu penyusunan strategi pengembangan dan pembinaan untuk berbagai bidang dan masalah yang dihadapi dengan tingkat akurasi (accuracy) yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Problema Kemiskinan dan Faktor yang Perlu Diperhatikan

Dalam era globalisasi dimana informasi semakin dapat masuk mencapai pelosok-pelosok. Demikian pula kontak antar individu dan wilayah lebih gampang, tampaknya terdapat kecenderungan bahwa golongan yang lemah akan semakin terbenam dalam kemiskinannya karena kalah dan terdesak dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan golongan-golongan lain yang lebih berpunya.

Kemudian daripada itu, kecendrungan globalisasi tersebut dalam masa pembangunan mendatang menyebabkan semakin dominannya kecenderungan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penetrasi pasar dalam kegiatan perekonomian. Penetrasi pasar yang bersamaan dengan terjadinya ketimpangan yang semakin besar justru tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan yang dilakukan.

Seperti yang dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi (1981) bahwa penetrasi kekuatan pasar, bersama dengan berlangsungnya proses semakin timpangnya distribusi pendapatan, akan dapat menciptakan suatu ambang batas, yang dari titik itu proses stratifikasi akan berevolusi ke arah polarisasi. Jika ekonomi pedesaan bergerak ke arah ini, dikhawatirkan bahwa pertentangan kelas akan meningkat, stabilitas terganggu dan dengan demikian usaha pembangunan jangka panjang menjadi terhambat.

Stratifikasi golongan-golongan masyarakat ke arah polarisasi yang tidak menguntungkan ini akan membagi masyarakat menjadi dua kelompok utama yang sangat berbeda kesempatan dan peluangnya untuk berpartisipasi dan menikmati kegiatan-kegiatan pembangunan, yaitu kelompok elit dan jelata. Kelompok elit komponennya antara lain adalah para pemilik modal kuat, birokrat, para rentenir dan agen-agen kapitalis. Sedangkan kelompok jelata yaitu petani-petani gurem yang menguasai/memiliki lahan sempit, buruh tani, pekerjaan kasar dengan penghasilan kecil serta mereka yang berada dalam serba kekurangan dan miskin.

Menurut Arief (1990) kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia bukan disebabkan karena mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka tertinggal dan miskin karena kesempatan tidak diberikan kepadanya. Secara lebih spesifik keterbelakangan dan kemiskinannya disebabkan oleh penghancuran kesempatan yang terjadi akibat proses eksploitasi dalam bentuk: (1) pertukaran yang tidak adil dalam proses tukar menukar komoditas, (2) pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja, (3) pengenaan pungutan yang relatif memberatkan bagi rakyat kecil.

Di samping itu, perlu pula kiranya disadari bahwa kemiskinan rakyat kita bukanlah merupakan fenomena kemelaratan material semata, tetapi telah merupakan suatu fenomena sosio-kultural yang lebih kompleks. Karena itu segala upaya untuk pembangunan masyarakat kelas bawah

atau kelompok jelata tersebut tidak hanya harus bertumpu pada pendekatan ekonomi tetapi hendaknya mengikutsertakan juga pendekatan-pendekatan sosio-kultural.

Lagi pula kemiskinan di pedesaan secara intrinsik berhubungan dengan : (1) pola pemilikan lahan dan produktivitas lahan, (2) struktur kesempatan kerja, dan (3) pasar tenaga kerja. Dalam bentuk yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa individu-individu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai perbedaan dalam hal anugerah sumberdaya yang mereka terima, khususnya penguasaan lahan (land endowment) dan modal manusia (human capital). Terapat korelasi antara standar hidup dengan jumlah dan kualitas lahan yang dikuasai atau dimiliki. Disamping itu juga terdapat korelasi antara standar hidup dengan tingkat keahlian dan pendidikan dari anggota rumah tangga. Suatu rumah tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan penguasaan modal manusianya terbatas, jika tidak ada menerima bantuan dan transfer pendapatan dari pihak lain akan cenderung terus tenggelam dalam kemiskinannya (Thorbecke, et al : 1993).

#### **B. Pembangunan Untuk Mengatasi Kemiskinan**

Setiap negara, setiap region dalam suatu negara, setiap kelompok yang terorganisir dan bahkan setiap orang sebenarnya selalu terlibat dalam kegiatan pembangunan. Berbagai definisi, strategi dan pendekatan pembangunan yang diajukan kesemuanya bermuara kepada suatu tujuan, yaitu perubahan ke arah perbaikan.

Penetapan tujuan pembangunan merupakan pengejawantahan dari penetapan pilihan prioritas dalam memenuhi keinginan (apakah itu keinginan seseorang, sekelompok orang ataupun seluruh bangsa) yang beragam berdasarkan sumberdaya alam yang terbatas. Kegiatan pembangunan itu sendiri bersifat dinamis, artinya meskipun konsep dasarnya sama namun implementasinya akan berbeda tergantung pada dimensi waktu, ruang dan kepentingan.

Kemajuan ekonomi adalah komponen utama pembangunan, tetapi bukanlah merupakan satu-satunya komponen, sebab pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi belaka karena pada akhirnya ia harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Pada saat sekarang pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai suatu serangan terhadap kejahatan utama dunia seperti : kekurangan gizi, buta huruf, kumuh, pengangguran dan ketidakmerataan. Apabila diukur dalam kerangka tingkat pertumbuhan ekonomi maka pembangunan telah berhasil dengan baik tetapi bila diukur dengan kerangka kesempatan kerja, keadilan dan pemberantasan kemiskinan maka pembangunan tersebut telah gagal, atau walaupun harus dikatakan berhasil hanyalah berhasil sebahagian (Streeten : 1980).

Persoalannya sekarang adalah siapakah sebenarnya yang jahat seperti yang dikemukakan Streeten ? Apakah masyarakat miskin yang karena kepapaannya terpaksa memeras lingkungan di luar batas kemampuan lingkungan



tersebut, ataukah golongan kaya yang karena kerakusannya mengurus sumberdaya alam secara semena-mena demi memuaskan nafsu serakahnya ?. Jawaban akan persoalan ini sangat menentukan pilihan kebijakan yang akan diterapkan dalam penanggulangan problema kemiskinan tersebut.

Berkenaan dengan itu maka setiap pembangunan haruslah mampu memberikan jawaban yang positif bagi tantangan yang timbul dari persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Jika salah satu saja dari persyaratan tersebut menjadi semakin buruk, apalagi ketiga-tiganya maka pembangunan belum dapat dikatakan berhasil, kendatipun misalnya pendapatan perkapita telah mencapai peningkatan sampai dua kali lipat (Dudley : 1969).

Dengan demikian pembangunan seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang multidimensi yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Selain peningkatan pendapatan dan keluaran (output) ia berurusan dengan perubahan yang mendasar dalam sistem kelembagaan, sistem sosial dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal dengan kebiasaan dan kepercayaan (Todaro : 1991).

### C. Acuan Dasar Analisis Potensi Desa

Desa lebih tepat dipandang sebagai suatu organisasi masyarakat yang mengatur saling hubungan (interdependensi) antar warga setempat dan warga luar

1625/K/97 - ag (2)

KI  
307.72  
HAS  
17  
ag

desa itu sendiri terhadap sesuatu, situasi ataupun kondisi yang membuat mereka saling tergantung. Kemudian sebagai satuan organisasi pemerintahan, desa memegang peranan penting dalam setiap alokasi dan distribusi komoditas, terutama komoditas yang bersifat publik atau komoditas kolektif (collective goods).

Keputusan-keputusan desa dapat pula mempengaruhi proses-proses produksi atau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warganya walau sekalipun komoditas yang dibicarakan itu adalah komoditas privat (private goods). Keputusan-keputusan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi potensi ekonomi desa.

Data potensi desa seperti yang dapat dilihat di kantor-kantor kepala desa ataupun dalam monografi desa biasanya berisikan informasi mengenai : jumlah penduduk, luas lahan sawah dan perkebunan, jenis irigasi, populasi ternak menurut jenisnya, fasilitas sosial menurut jenis dan jumlahnya, organisasi kemasyarakatan (kelembagaan), dan seterusnya. Kesemua data potensi desa tersebut mencerminkan kekayaan (resource endowment) desa, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kekayaan desa dalam bentuk: (1) sumberdaya alam dan kapital, (2) sumberdaya manusia, (3) teknologi, dan (4) kelembagaan (institusi). Performans (penampilan dan prestasi) desa seperti distribusi pendapatan, tingkat produksi, laju pertumbuhan penduduk, partisipasi pendidikan dan lain sebagainya adalah merupakan hasil interaksi yang secara terus-menerus dari keempat faktor tersebut di atas. Oleh

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

karena itu, ke empat faktor yang dimaksud perlu dijadikan acuan dalam melakukan analisis mengenai potensi desa (Pakpahan : 1989).

Ditinjau dari syarat keharusan dan kecukupan bagi peningkatan potensi desa, unsur teknologi memang benar merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pedesaan. Akan tetapi teknologi saja belumlah cukup untuk menjamin kelangsungan peningkatan potensi desa. Hal yang sama juga berlaku atas sumberdaya alam dan kapital. Unsur-unsur ini memang merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau potensi, namun sumberdaya alam dan kapital saja belumlah memenuhi syarat kecukupan. Dengan demikian apa yang diperlukan di dalam meningkatkan potensi desa tersebut secara lestari adalah adanya komplementaritas minimal dari ke empat unsur di atas, yaitu : teknologi, sumberdaya alam dan kapital, sumberdaya manusia serta kelembagaan.

Adapun unsur kelembagaan dalam hal ini memiliki peranan khusus. Sebagai "rules of the game" faktor kelembagaan dapat berfungsi dalam mengatur alokasi sumberdaya dan distribusi manfaat bagi kehidupan. Kelembagaan akan mengatur saling hubungan (interdependensi) antar para pemilik input dalam menghasilkan output desa. Disamping itu, menurut Nagamine (1975) keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada faktor "economic viability" dan sociopolitical acceptability", sementara kedua faktor ini akan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan (institutional).

Keragaan antar desa bukan hanya disebabkan oleh keragaman dalam sumberdaya alam atau teknologi saja, melainkan juga disebabkan oleh keragaman dalam kelembagaan. Hal ini dapat bersumber dari perbedaan dalam batas-batas yuridiksiasi, aturan representasi ataupun kepemilikan. Dijumpainya variasi kelembagaan antar daerah mencerminkan bahwa faktor kelembagaan merupakan faktor penting dalam menduga atau memperkirakan potensi suatu desa. Status kelembagaan tersebut di dalam proses produksi atau distribusi, berbeda dengan status sumberdaya alam dan kapital, sumberdaya manusia, serta bersama dari suatu masyarakat yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat terhadap sesuatu, kondisi dan situasi (Pakpahan : 1989).

Demikian pula halnya dalam keragaman sumberdaya manusia, sangat perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan pedesaan. Sumberdaya manusia baik dari segi jumlah maupun kemampuan dan keahliannya akan bervariasi di antara masing-masing desa. Keahlian yang dimaksud disini akan mencakup pula keterampilan manajerial produksi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Disisi jumlahnya, kepadatan penduduk di suatu desa akan menunjukkan intensitas penggunaan lahan di wilayah desa bersangkutan. Kepadatan penduduk yang tinggi secara implisit memperlihatkan apakah sumberdaya yang tersedia di wilayah bersangkutan, tatanan kelembagaan yang berlaku, dan teknologi yang tersedia cukup potensial untuk mencukupi kebutuhan populasi di wilayah tersebut.

Tenaga ahli di bidang pertanian umumnya banyak kaitannya dengan pembangunan pedesaan. Di samping itu juga penyuluhan, sarana dan prasarana komunikasi serta fasilitas pendidikan akan erat sekali kaitannya dengan kemampuan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia. Keahlian dan teknologi tertentu perlu dikuasai oleh sumberdaya manusia di pedesaan, namun keberhasilan semuanya itu akan tergantung pula dari faktor kelembagaan yang mengkoordinasikan seluruh "input supplier" yang bekerjasama dalam menghasilkan manfaat dari suatu sumberdaya.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dari unsur-unsur tersebut di atas maka perlu untuk mendapat perhatian serta menjadi dasar dalam setiap upaya menganalisis potensi desa ataupun mengidentifikasi penyebab ketertinggalannya.

#### **D. Sumberdaya Dalam Pembangunan dan Proses Produksi**

Sumber daya adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana seseorang/ individu atau kelompok masyarakat menemukannya. Bentuknya dapat berupa sesuatu yang terdapat di bumi baik yang hidup ataupun benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan ekologi (Reksohadiputro, 1988).

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka sumberdaya yang ada pada suatu wilayah dapat berupa

sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya sosial. Sementara, sumberdaya alam itu sendiri dapat pula terbentuk sumberdaya lahan mencakup untuk pertanian, keindahan dan rekreasi, sumberdaya hutan dan segala hasil-hasilnya, sumberdaya air dengan kekayaannya serta sumber-sumberdaya non hayati meliputi mineral ataupun bahan-bahan tambang dan galian.

Bagaimana pentingnya peranan sumberdaya tersebut bagi pembangunan nasional, mencakup tentunya pembangunan wilayah pedesaan sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat bisa mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Seperti misalnya masyarakat Mesopotamia di jaman dulu yang berhasil menciptakan sistem irigasi untuk pertanian. Atau beberapa kerajaan di tanah air pada masa lalu seperti Singosari dan Kahuripan, juga memanfaatkan potensi air sungai Brantas untuk irigasinya dan membawa kemakmuran.

Dalam masa berikutnya, tokoh ekonomi terkenal Adam Smith mengemukakan teori tentang "Absolute Comparative Advantage" menyarankan agar setiap masyarakat memproduksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Jadi sebuah masyarakat yang kaya akan sumberdaya dibanding masyarakat lain akan mampu lebih banyak memproduksi. Melalui proses pertukaran (perdagangan) maka kelebihan produksi bisa ditukar dengan barang produksi lain yang dibutuhkan namun tidak diproduksi sendiri.

Perantaraan fungsi produksi bisa dilihat bagaimana peranan sumberdaya alam sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk itu perlu dirumuskan faktor apa saja yang dibutuhkan bagi pertumbuhan atau produksi, yaitu faktor-faktor yang menunjukkan hubungan antara jumlah masukan (input) dengan keluaran (output). Lebih lanjut dalam hal ini Reksohadiputro (1988), mengemukakan model hubungan sebagai berikut:

$$Y = f ( TK, K, N, E, T )$$

Fungsi ini dapat diartikan sebagai output/produksi sesuatu wilayah atau negara ( Y ) selama periode tertentu tergantung pada aliran masukan tenaga kerja (TK), Kapital (K), sumberdaya alam (N), kewiraswastaan/entrepreneurship (E) dan teknologi (T). Dari model fungsi tersebut terlihat bahwa sumberdaya alam bersama dengan masukan lainnya menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi/peningkatan output. Secara sederhana dapat dikemukakan, jika sumberdaya dilipatkan penggunaannya maka pertumbuhan hasil dapat pula ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Kuznets (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sayangnya dibatasi oleh kekurangan absolut dari sumberdaya alam. Dari pernyataan ini tersirat perkiraan bahwa wilayah atau negara yang miskin akan sumberdaya alam akan tersendat-sendat pertumbuhannya. Namun demikian, menurut ahli ekonomi lainnya berpendapat kekayaan suatu negara akan

sumberdaya tidak mutlak berhubungan dengan pertumbuhan ekonominya, tetapi juga lebih tergantung pada kemampuan menyiapkan sumberdaya dalam proses produksi. jadi, bagi wilayah atau negara yang tidak mempunyai kekayaan sumberdaya kesiapannya diwujudkan di dalam bentuk pembelian.

### **1. Sumberdaya Lahan Dalam Pembangunan Pedesaan**

Berbicara masalah pembangunan ekonomi, khususnya di pedesaan orang tidak akan lepas dari masalah pertanian. Sedangkan berbicara tentang pertanian tentunya tidak akan terlepas dari persoalan sumberdaya lahan sebab pertanian tumbuh karena tersedianya lahan.

Dalam ekonomi sumberdaya lahan diterangkan hubungan ekonomi antara manusia atau penduduk dalam suatu wilayah dengan lahan, yaitu menitikberatkan pada usaha manusia dalam menggunakan lahan dan kaitannya dengan faktor fisik, biologi, ekonomi dan kelembagaan serta kondisi dan kontrol penggunaannya (Barlow, 1972).

Sebagai salah satu faktor produksi lahan ikut menentukan jumlah hasil (output) dari pertanian dan sekaligus menunjukkan keluaran atau produksi (output) desa yang paling dominan. Oleh Tedjujuwono (1987) diungkapkan bahwa lahan mempunyai produktivitas untuk dapat menghasilkan bahan nabati, mempunyai daya tumpu, serta mampu memenuhi kebutuhan kebendaan dan kejiwaan sekaligus penyangga sumberdaya lain.



Pentingnya lahan sebagai faktor produksi dalam pembangunan pedesaan, bukan saja dilihat dari segi luasnya tetapi juga dari segi kondisi fisiknya seperti, kesuburan, topografi, dan termasuk macam penggunaannya. Luas lahan pertanian ikut mempengaruhi skala sektor pertanian dan begitu juga akan mempengaruhi efisiensi. Sering didapati semakin luas lahan yang diusahakan untuk kegiatan pertanian, maka makin tidak efisien penggunaan lahan tersebut. Karena penggunaan faktor lahan dalam usaha pertanian terkait pula atas beberapa hal, antara lain:

- a. Terbatasnya tenaga kerja di sekitar wilayah desa bersangkutan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian.
- b. Terbatasnya modal dipihak petani untuk membiayai usaha pertanian, baik untuk membiayai teknologi maupun pembiayaan usaha (modal kerja) yang sesuai dengan skala luas lahan.
- c. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi yang digunakan.

Kemudian dari pada itu, faktor kesuburan tau kelas kemampuan dan kesesuaian lahan juga ikut menentukan produktivitas tanaman. Lahan yang subur akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding lahan yang kesuburannya relatif rendah. Menurut Sarwono (1986) lahan adalah sesuatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-

faktor tersebut mempengaruhi potensi kegunaannya termasuk ke dalamnya akibat kegiatan manusia baik masa lalu maupun sekarang.

Dari segi sewa lahan, teori Ricardo mengemukakan bahwa sewa lahan akan berbeda-beda disebabkan perbedaan kesuburan tanah (heterogenitas tanah). Orang cenderung mencari dan mengerjakan tanah yang subur lebih dulu. Setelah tanah subur terpakai semua barulah beralih ke kualitas yang lebih rendah.

Jadi, sumberdaya lahan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan karena tak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertanian sebagai bentuk usaha ekonomi atau produksi utama masyarakat desa. Jika pemerintah ingin menaikkan kesejahteraan hidup petani maka cara yang bisa diambil antara membantu menaikkan produksi dari hasil pertaniannya dan harga yang mereka terima.

## **2. Sumberdaya Air Dalam Pembangunan Pedesaan**

Air menjadi sumberdaya terpenting setelah sumberdaya lahan, disebabkan sumberdaya air mampu menambah kesuburan tanah sehingga memungkinkan tumbuhnya sumberdaya lain seperti vegetasi ataupun penting bagi pertumbuhan tanaman.

Dari hal ketersediaannya, sumberdaya air di bumi ada dalam bentuk "stock" yaitu berupa air tanah dan "flow" atau aliran yang disebut juga sebagai air permukaan. Aliran air akan membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa serta sebahagiannya mungkin hilang menguap atau meresap

ke dalam tanah membentuk air tanah. Keduanya air tanah dan air permukaan akan memenuhi kebutuhan manusia seperti untuk irigasi maupun kebutuhan air minum.

Ditinjau dari hal pemanfaatannya ataupun kaitan dengan pembangunan dan kebutuhan, Ely dan Wehrwein (1940) membagi penggunaan air untuk dua jenis tujuan yaitu penggunaan untuk pemungutan hasil, misalnya usaha perikanan, tenaga air dan penggunaan bersifat memiliki langsung seperti misalnya perikanan, tenaga air serta penggunaan yang bersifat memiliki langsung misalnya untuk irigasi dan industri. Pada penggunaan pertama masyarakat hanya mempunyai hak akan air namun hanya aliran air itu saja yang boleh dicari manfaat terkandung di dalamnya, sedangkan pada penggunaan kedua zat air itu sendiri boleh dimiliki.

Berdasarkan sektor-sektor yang memanfaatkan potensi air maka sektor pertanian dipandang sebagai konsumen terbesar. Keperluan air bagi sektor ini mencakup keperluan tanaman pangan, perikanan dan juga peternakan. Sementara untuk sektor industri pemakaian air bisa berfungsi sebagai masukan (input) pendingin mesin-mesin ataupun pembuang kotoran.

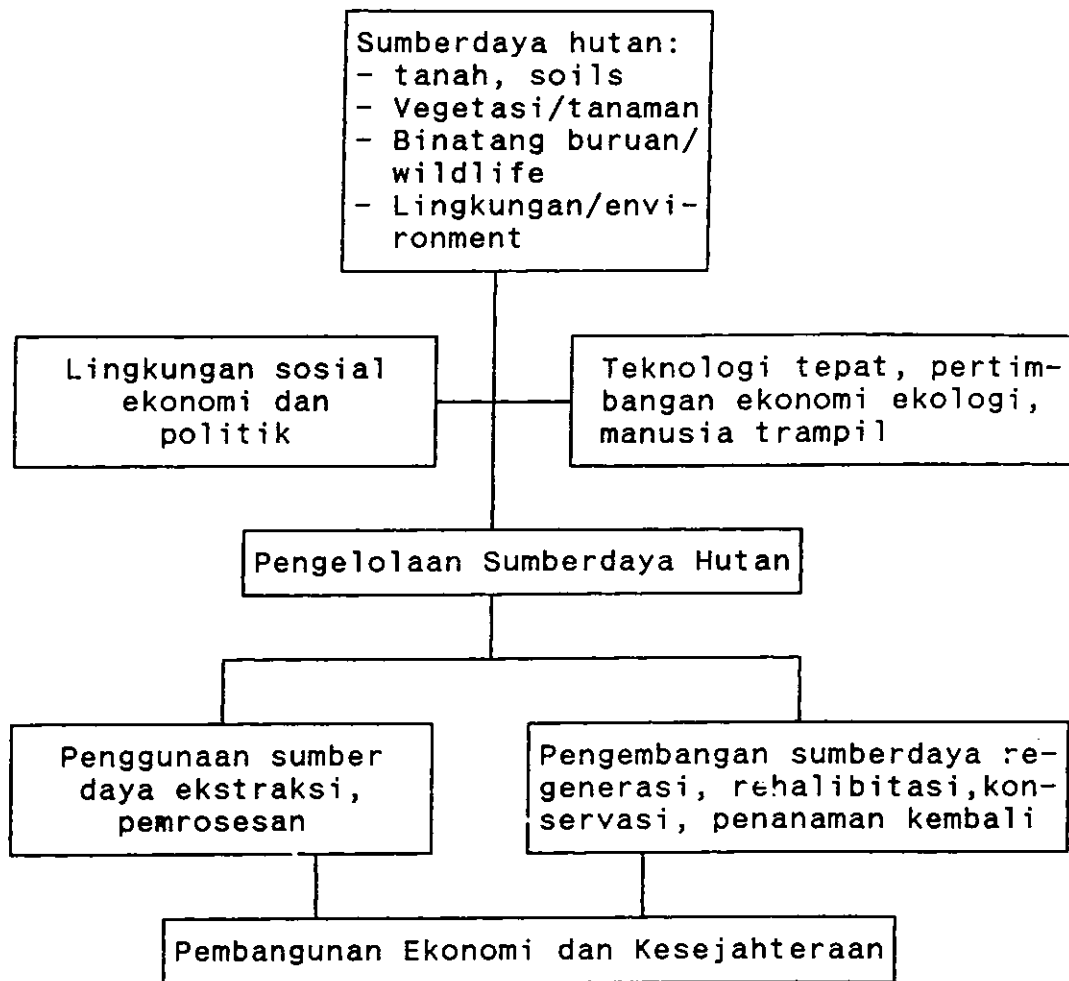
Mengingat pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan maka program pengadaan dan peningkatan pengairan (irigasi) yang difatnya vital bagi keberhasilan pembangunan pertanian mutlak diperlukan.

### 3. Sumberdaya Hutan Dalam Pembangunan Pedesaan

Pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat tak terkecuali tentunya di pedesaan kini dirasakan semakin meningkat. Jika semula hutan masih digunakan sebagai sumber bahan makanan/buah-buahan, berburu binatang dan sumber bahan bakar maka dengan perkembangan kebudayaan dan ekonomi sumberdaya hutan dimanfaatkan lebih intensif sebagai masukan (input) di dalam proses produksi.

Permintaan terhadap masukan hasil hutan terus meningkat sementara sifat sumberdaya ini dapat habis, sehingga dengan demikian menuntut akan kesadaran untuk mengelolanya tidak hanya dari segi finansial tetapi juga diperluas menjadi pengelolaan yang berkelanjutan (sustainable development). Konsep pengelolaan sumberdaya hutan haruslah dipandang sebagai bagian dari pengelolaan sumber alam dengan manusia berperan aktif dalam proses produksi, distribusi, konsumsi serta pengembangan sumbernya itu sendiri.

Soerianegara (1982) menggambarkan skema pengelolaan sumberdaya hutan bagi tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan seperti terlihat sebagai berikut.



Skema: Tujuan dan kendala pengelolaan sumberdaya hutan  
(Ishemat Soerianegara dalam "Socio-economics aspects of  
Forest Resources Management, 1982).

Jadi, bilamana dikaitkan dengan tujuan pembangunan pedesaan sumberdaya hutan berperan dalam berbagai hal di antara lain yaitu:

- a. Dampak ekologis, seperti (1) perlindungan kawasan tangkapan untuk mengendalikan kemungkinan banjir atau run off, menyediakan air, irigasi, mempertahankan kesuburan tanah, dan oksigen. (2) Konservasi ekologi dan satwa liar, wisata dan sebagainya, (3) pengendali erosi tanah, pemecah angin dan reklamasi

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

lahan kritis.

- b. Keperluan konsumsi, seperti (1) bahan kayu bakar dan kebutuhan perumahan, (2) pemanfaatan pertanian, pengembalaan ternak, (3) kebutuhan bahan makanan dan industri.

#### 4. Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Pedesaan

Sumberdaya manusia atau penduduk dalam pandangan teori ekonomi klasik pertumbuhannya berarti juga peningkatan angkatan kerja, yang dianggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar angkatan kerja maka semakin banyak pula tenaga kerja yang produktif.

Tetapi harus diingat bahwa hal tersebut juga tergantung pada sistem ekonomi untuk menyerap dan memperkerjakan tambahan angkatan kerja tersebut dimana hal ini juga tidak terlepas atau erat kaitannya dengan faktor produksi lainnya baik sumberdaya alam maupun modal dan teknologi.

Di wilayah pedesaan yang pada umumnya penduduk bekerja di bidang pertanian, penggunaan tenaga kerjanya menurut Sukartawi (1987) dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai merupakan besarnya tenaga kerja yang efektif dipakai, dimana skala usaha biasanya akan mempengaruhi besar kecilnya tenaga yang dibutuhkan serta menentukan jenis tenaga kerja yang diperlukan.

Usaha pertanian dengan skala usaha yang relatif kecil akan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, sebaliknya untuk usaha pertanian skala besar lebih banyak mempergunakan tenaga kerja di luar keluarga dan sering dijumpai dalam bentuk tenaga trampil dan sewa atau upah.

Kemudian, Mubyarto (1985) menyatakan bahwa sumberdaya manusia atau tenaga kerja di pedesaan sangat relatif jumlah disebabkan karena faktor umur dan jenis angkatan kerja tidak dapat dipastikan menurut teori-teori perburuhan. Hal ini biasanya terjadi karena peranan gotong royong dalam keluarga atau masyarakat di pedesaan sangat mendarah daging. Akibatnya berapa dengan pasti kekurangan dan kelebihan tenaga kerja di bidang usaha pertanian agak lebih sulit.

Namun demikian, dalam analisis ketenagakerjaan juga diperlukan pembedaan antara tenaga kerja pria, wanita dan tenaga kerja anak. Pengklasifikasian ini terjadi karena setiap pekerjaan dalam usaha pertanian adalah berbeda-beda di samping dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Misalnya pekerjaan pengolahan lahan yang memerlukan tenaga kerja umumnya dilakukan oleh pria. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan menanam atau membersihkan rumput banyak dilakukan oleh wanita dan anak-anak.

Oleh karena masalah sumberdaya manusia tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah angkatan kerja dan kesempatan kerja, apalagi di pedesaan maka usaha-usaha memakmurkan desa serta membuka peluang kesempatan kerja sangat penting artinya dalam pembangunan wilayah

pedesaan. Peningkatan kesempatan kerja di pedesaan tentunya dapat dilakukan melalui pembangunan sarana-sarana produksi ataupun pengembangan bidang kegiatan dan ekonomi masyarakat di wilayah bersangkutan, khususnya usaha pertanian dalam arti yang luas.



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu desa tertinggal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok, yaitu Desa Sukoharjo. Pemilihannya sebagai lokasi penelitian ditetapkan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa desa bersangkutan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat ditetapkan menjadi Desa Binaan IKIP Padang.

Kemudian dari pada itu, dari sejumlah desa yang diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dalam wilayah Kecamatan tersebut desa Sukoharjo dipandang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri baik dari segi aspek sosial ekonomi masyarakatnya maupun segi fisik wilayahnya.

Oleh karena sifat penelitian ini lebih menekankan pada aspek studi regional, maka satuan analisis yang digunakan bertumpu pada karakteristik dan potensi sumberdaya wilayah desa bersangkutan. Disamping menjangkau potensi yang dimiliki desa tersebut juga penekanan analisisnya pada faktor-faktor penyebab ketertinggalannya yang mengacu pada kondisi fisik dan potensi wilayah serta refleksi dari pemimpin formal dan informal ataupun warga setempat.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder dan dilengkapi dengan data primer guna melengkapi kebutuhan dan keperluan analisis yang dilakukan.

Data sekunder diambil dan dikumpulkan dari Kantor Kepala Desa, Kantor Camat Kecamatan Sangir, serta Kantor Dinas dan Instansi yang ada dalam wilayah Kecamatan Sangir, seperti Dinas Pertanian Kecamatan dan Kandep P dan K Kecamatan. Disamping itu, juga bersumber pada hasil-hasil penelitian sebelumnya serta dokumentasi yang dipandang relevan dengan penelitian ini.

Untuk data primer langsung diperoleh di lapangan, yaitu melalui sejumlah informan baik di tingkat pedesaan maupun tingkat kecamatan, meliputi:

1. Aparat Pemerintahan Desa, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Dusun dalam wilayah desa bersangkutan.
2. Ketua dan Seksi-seksi dalam organisasi/lembaga pembangunan desa (LKMD).
3. Beberapa Kepala Dinas dan Instansi terkait di wilayah Kecamatan yang sempat dihubungi, diantara lain adalah Sekretaris Camat, Dinas Pertanian dan Kandep P dan K, serta Kepala Bagian Urusan Pemerintahan.
4. Tokoh informal dalam masyarakat yang dipandang berpengaruh serta sejumlah warga masyarakat yang sempat dihubungi dan diundang khusus pada suatu pertemuan dengan peneliti.

5. Tempat dan peristiwa, dengan mengamati kondisi lokasi serta pola usaha atau kegiatan masyarakat di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif, serta jenis dan sumber data yang digunakan maka variabel yang menyangkut dengan permasalahan penelitian dikumpulkan perantaraannya:

#### **1. Mencatat Dokumen dan Informasi**

Data yang bersifat sekunder diambil dan dicatat ataupun dikopi dari dokumen/arsip-arsip yang ada pada Kantor Desa, kantor camat dan Dinas Instansi terkait.

#### **2. Wawancara dan Pertemuan**

Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan memfokuskan pada permasalahan atau data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Kemudian untuk menjaring informasi mengenai kendala dan masalah yang dihadapi masyarakat ataupun permasalahan yang dihadapi desa, dilakukan pertemuan khusus dengan warga masyarakat, yaitu mengundang mereka melalui perantaraan Kepala Desa untuk menghadiri pertemuan dengan meneliti di dalam ruangan tertentu (gedung SD).

Dalam pertemuan tersebut warga desa yang hadir dimintakan kesediaannya mengungkapkan dan sekaligus menuliskan permasalahan yang mereka hadapi baik

menyangkut bidang pembangunan dan kebutuhan desa maupun keperluan mereka sendiri serta kelompok. Kepada masing-masing mereka dibagikan selembar kertas guna menuliskan aspirasi atau pendapatnya kemudian menempelkan pada lembaran karton/kertas yang telah disiapkan oleh peneliti. Jadi, secara bersama-sama mereka dapat melihat masalah-masalah dan kebutuhan desanya dalam arti yang luas. Teknik semacam ini disebut sebagai "Refleksi Partisipatif" yang banyak dikembangkan oleh para peneliti Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan serta Studi-studi penjajagan tentang pembinaan masyarakat, di dalam memotret pikiran warga desa dengan asumsi bahwa tidak ada kelompok atau orang lain yang lebih tahu tentang masalah-masalah desa dan warganya terkecuali mereka sendiri.

Kegiatan pertemuan semacam ini juga dapat dipandang sebagai triangulasi, dimana masyarakat disuruh atau dimintakan pendapatnya tentang keadaan dan permasalahan menurut aspirasi dan pikiran mereka sendiri.

#### **D. Peubah (Variable) Penelitian**

Peubah-peubah atau variable yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi prihal, propil dan karakteristik sumberdaya wilayah, potensi dan produksi desa serta propil aktivitas usaha (ekonomi) masyarakat dan keadaan sarana dan prasarana pedesaan.

Penjelasan mengenai peubah-peubah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik, kondisi sumberdaya wilayah, yaitu meliputi: letak geografis dan orbitasi desa, kondisi sumberdaya lahan, sumberdaya air dan hutan, sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial.
2. Potensi desa akan menyangkut hasil-hasil desa yang terdiri dari kegiatan usaha ekonomi masyarakat, yaitu: produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3. Kondisi sarana dan prasarana pedesaan, mencakup perihal fasilitas sosial, transportasi, penerangan serta bentuk jasa pendukung kegiatan/produksi yang ada dalam wilayah desa bersangkutan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif maka metoda analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran potensi pembangunan dan penyebab ketertinggalan wilayah desa bersangkutan dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan membandingkan beberapa temuannya dengan kondisi wilayah yang lebih luas (kecamatan) atau desa lainnya.

Khusus untuk menjaring faktor penyebab ketertinggalan wilayah desa ini, disamping diperoleh dari hasil analisis secara pendekatan wilayah juga dilakukan analisis terhadap isi pernyataan dan refleksi warga desa. Kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang usaha dan kegiatan utama masyarakat desa dan sekaligus ditetapkan sejumlah alternatif pemecahan atau program penanggulangannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik dan Potensi Sumberdaya Wilayah Desa Sukoharjo

Pada dasarnya identifikasi wilayah dan golongan penduduk miskin adalah dua hal yang berbeda, yaitu tergantung pada penekanan masing-masing satuan analisis yang dilakukan. Mengidentifikasi golongan penduduk miskin lebih menekankan pada satuan analisis per orang atau perkapita dan lebih lanjut pada identitas atau karakteristik golongan sasaran. Sedangkan identifikasi wilayah miskin atau tertinggal akan lebih ditekankan pada satuan analisis wilayah (region) dan lebih lanjut pada identifikasi karakteristik wilayah.

Kemudian, untuk mengetahui potensi sumberdaya yang ada di suatu desa akan diperlukan pula sejumlah data fisik wilayah, baik menyangkut kondisi dan potensi (daya dukung) alam maupun potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan (daya dukung sosial) serta keragaman produksi desa dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat (infrastruktur dan teknologi) yang terdapat di wilayah bersangkutan. Berdasarkan fakta dan kondisi yang ada serta diikuti dengan sejumlah asumsi tertentu akan dapat dianalisis dan diramalkan bagaimana prospek dan pengembangan desa tersebut dimasa yang akan datang serta sekaligus dapat pula diketahui atau ditemukan faktor-faktor penyebab ketertinggalannya.

### 1. Letak Geografis dan Orbitasi Desa

Desa Sukoharjo terletak di Kecamatan Sangir dalam wilayah Kabupaten Solok dengan jarak kurang lebih 164 km dari ibukota Provinsi Sumatera Barat, Padang. Menurut wilayah administrasi pemerintahan letaknya berbatasan.

Sebelah utara dengan Desa Pakan Salasa

Sebelah selatan dengan Desa Liki

Sebelah timur dengan Desa Sungai Lambai

Sebelah barat dengan Desa Pecconina.

Ditinjau dari segi ekonomi letaknya cukup strategis, yaitu berada pada pinggiran (dilewati) jalan utama yang menghubungkan daerah Sumatera Barat dan daerah Kabupaten Kerinci, di Provinsi Jambi. Letaknya yang strategis ini mempunyai arti tersendiri bagi pembangunan desa tersebut, yaitu berupa potensi lokasi yang memungkinkan bagi kemudahan dalam lajur transportasi untuk membawa dan memasarkan barang dagangan atau hasil bumi (produksi desa) dari atau ke kota Padang dan kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci.

Potensi lokasi yang demikian hanya dapat dimanfaatkan bilamana tata kehidupan ekonomi ataupun sumber-sumber mata pencaharian masyarakat berkembang dengan baik, sehingga surplus hasil (output) desa memungkinkan dipasarkan langsung ke luar wilayah. Dengan ketersediaan dan meningkatnya volume sarana angkutan melewati jalur lalu lintas tersebut tidak hanya

memudahkan dalam pengangkutan setiap komoditas yang dihasilkan tetapi juga sekaligus membuka keterisolasian atau ketertutupan desa terhadap kota.

Ditinjau dari sisi orbitasinya terhadap pusat dan fasilitas pelayanan di tingkat Kecamatan, seperti Pasar dan Puskesmas letak desa ini berada kurang lebih 12 Km dan dapat dicapai melalui sarana angkutan darat. Akan tetapi lokasi atau areal perkampungan masyarakat ke pinggiran jalan utama, jaraknya mencapai sekitar 1 Km sampai dengan 4 Km dengan dari pusat-pusat pelayanan di tingkat Kabupaten jaraknya cukup jauh yaitu mencapai kurang lebih 154 Km.

Letak dan orbitasinya yang cukup jauh dari pusat pelayanan dan pemerintahan di tingkat Kabupaten sudah barang tentu membawa dampak atau berpengaruh dalam hal aktivitas kunjungan dari berbagai pihak Dinas dan Instansi yang ada di ibukota Kabupaten (Solok). Apalagi ditambah dengan luas wilayah pemerintahan Kecamatan Sangir ini yang cukup luas dengan jumlah aparat dan petugas yang sangat terbatas. Kesemuanya, mempengaruhi akan frekuensi kedatangan ataupun pelayanan dari petugas tersebut, sebagaimana yang dikemukakan dan dirasakan oleh beberapa tokoh masyarakat saat diwawancarai dan bertukar pikiran dengan mereka. Begitu pula dengan ungkapan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Sangir ketika menerima mahasiswa KKN IKIP Padang periode 1995/1996 yang menyatakan bahwa:

"Perlu saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa ketahui, bahwa wilayah Kecamatan Sangir ini sangat luas sekali, yaitu hampir seluas daerah Kabupaten



Tanah Datar, sementara jumlah petugas atau tenaga yang dapat melayani masyarakat dirasakan sangat kurang. Ditambah lagi dengan fasilitas kendaraan yang belum memadai/kurang dan jangkauan wilayah operasi yang jauh. Jadi, kami merasa sangat senang dan terbantu sehubungan dengan hadirnya saudara-saudara mahasiswa IKIP Padang untuk ber-KKN di daerah Sangir ini. Dulu orang mengatakan Sangir itu adalah singkatan dari Santai dan Ngeri, tapi sekarang kesan itu tidak ada lagi. Tidak demikian adanya dan jangan pula saudara merasa takut. Sangir ini indah, saudara bisa lihat menghijaunya pepohonan dan perkebunan teh.

Di samping berpengaruh terhadap aktivitas kunjungan aparat pemerintahan, jarak dan orbitasi desa ini berdasarkan teori lokasi akan mempengaruhi pembangunan ekonomi pedesaan. Semakin dekat jarak lokasi desa dari kota termasuk pusat pelayanan seperti pasar, maka semakin banyak keuntungannya. Salah satu diantaranya yaitu menyangkut teori "Pendekatan Biaya Terkecil (Least Cost Approach)" sebagaimana dikemukakan oleh Smith, yang mengaitkan unsur jarak dengan ongkos total. Kemudian dalam pengaplikasiannya oleh Prayitno (1985) disimpulkan bahwa bahan baku yang tidak lancar akan mempertinggi biaya pengadaan sehingga selanjutnya justru meningkatkan biaya produksi. Misalnya ketidaklancaran pengadaan pupuk, pakan ternak, bibit dan sebagainya akan mengakibatkan menurunnya produktivitas atau hasil yang diharapkan. Di sisi lain, meningkatkan biaya pengadaan bahan baku tersebut juga berakibat dari naiknya ongkos transpor, dimana di antaranya hal ini dapat ditimbulkan karena pengaruh faktor jarak angkut.

Sesungguhnya letak geografis wilayah desa Sukoharjo dilalui oleh jalan raya utama (antar provinsi) namun

karena perekonomian ataupun sumber-sumber potensial mata pencaharian masyarakat tidak begitu berkembang sehingga mereka belum banyak dapat mengutip manfaat dari keuntungan lokasi yang demikian. Tambahan lagi dipengaruhi faktor jarak desa tersebut yang cukup jauh dari pusat pelayanan terutama di tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi.

## **2. Luas Wilayah dan Potensi Sumberdaya Lahan**

Desa Sukoharjo menurut struktur pemerintahan desa terdiri dari 6 buah Dusun, yaitu : Dusun Karang Putih, dusun Sapan, dusun Air Menyuruk, dusun Bumi Ayu, dusun Pasir Putih dan dusun Sumberjo. Luas keseluruhan wilayahnya tercatat kurang lebih 5.517 hektar dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 700 meter sampai 850 meter.

Hampan dan bentangan wilayahnya yang termasuk bahagian dari lereng kaki gunung Kerinci membuat panorama seputar desa ini cukup indah dengan pesona kawasan perkebunan teh dan persawahan rakyat serta di sekitarnya terdapat bukit-bukit batu yang menawan. Letaknya di daerah ketinggian dengan kondisi permukaan tanah bertopografi datar dan sedikit bergelombang sampai berbukit serta mempunyai tingkat curah hujan mencapai 2000 mm - 3000 mm per tahun dan temperatur berkisar antara 20°C - 23°C sehingga hawa dan iklimnya terasa dingin.

Kesuburan tanahnya relatif baik sampai dengan sifat kemasam (pH) berkisar 3,5 - 5,0 dan umumnya mempunyai jenis tanah Ultisol (Pedzolik Merah Kuning) dan Andosol, berwarna kekuning-kuningan dan hitam. Sedangkan kemiringan lahannya mempunyai lereng 0%-30% dengan keadaan drainase di beberapa tempat tergenang air dan rawa-rawa serta bagian lainnya cukup baik dan tidak terhambat, sementara tingkat erosi bersifat ringan (Dinas Pertanian Kec. Sangir, 1995).

Bilamana dilihat dari segi ketinggian lahan terhadap pertumbuhan tanaman dan perkembangan ternak, maka potensi sumberdaya lahan desa tersebut relatif ideal dan sesuai karena masih berada pada ketinggian antara 0 - 1000 m. Begitu juga halnya dengan kemiringan lahannya tidak melebihi 40% sehingga cukup potensial dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

Kemudian, dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan terhadap berbagai aktivitas kegiatan masyarakat diketahui bahwasanya potensi sumberdaya lahan ini sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Secara umum penggunaannya dapat diklasifikasi atas beberapa peruntukan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan data dalam Tabel 1 diperoleh gambaran bahwa sebahagian besar luas wilayah desa Sukoharjo masih terdiri dari kawasan hutan, yaitu kurang lebih 3678 ha (66,70%) dari keseluruhan luas wilayah desa tersebut. Dibandingkan dengan luas kawasan hutan negara yang ada di daerah Kabupaten Solok, yang tercatat seluas 80,786 ha

Tabel 1. Klasifikasi Penggunaan Lahan di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1994.

Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Persen (%)
Persawahan	573	10,37
- Sawah Irigasi	(550)	(9,97)
- Sawah Tadah Hujan	( 23)	(0,40)
Perkebunan rakyat	893	16,20
Perkebunan negara	15	0,30
Tanah kering/ladang	226	4,00
Pekarangan/pemukiman	119	2,20
Hutan negara	3678	66,67
Rawa-rawa/empang	6	0,12
Tanah kas/kantor Desa	3	0,04
Pekuburan dan lain-lain	4	0,07
Jumlah	5517	100,00

Sumber: Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (diolah).

maka secara relatif areal kawasan hutan di desa ini meliputi kurang lebih sebanyak 4,55%. Dari informasi beberapa orang perangkat desa diketahui bahwa luas kawasan hutan tersebut nampaknya juga meliputi sebahagian kecil areal hutan rakyat/tanaman kayu-kayuan, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversikan.

Adapun luas sumberdaya lahan yang diusahakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, terutama pertanian dan perkebunan masing-masing hanya sekitar 573 ha (10,37%) dan seluas 893 ha (16,20%). Kendatipun tercermin potensinya lebih banyak diperuntukkan bagi usaha berkebun, namun bilamana diselidiki dan diamati di lapangan maka penggunaan dan pengusahaan sumberdaya lahan desa ini cukup potensial untuk pengembangan usaha pertanian padi sawah dan perladangan. Di samping

kondisinya dapat memenuhi syarat kesesuaian lahan persawahan dengan faktor pembatas tanah yang relatif sedikit serta iklim dan topografi yang cukup ideal, juga saat ini sudah ditunjang dengan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi. Kemudian di atas lahannya terdapat potensi sumberdaya air yang masih memungkinkan untuk upaya perbaikan ataupun peningkatan sistem pengairan yang ada.

Luas lahan kering yang ada di desa tersebut tersedia sekitar 267 ha (4,00%) dimana kondisinya masih mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Tidak hanya melalui penerapan dan perbaikan teknologi pengolahan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengelolaannya untuk berbagai usaha pengembangan lahan kering, seperti pertanian atau bercocok tanam di tegalan, peternakan dan sebagainya.

Selanjutnya, lahan perkarangan dan pemukiman yang ada di desa ini tercatat seluas 119 ha (2,20%) dimana pemanfaatannya selain untuk kepentingan tempat tinggal (bangunan rumah) juga oleh masyarakat diusahakan dan ditanami dengan tanaman pekarangan. Dari pengamatan di lapangan potensi lahan tersebut masih mungkin dapat ditingkatkan pemakaiannya, terutama bagi mereka yang memiliki area lahan pekarangan/pemukiman yang berdekatan atau terdapat potensi sumberdaya air dan rawa-rawa. Sebagaimana hasil temuan Terra (1970) petani-petani di pedesaan kebanyakan mempunyai berbagai jenis lahan seperti, lahan pekarangan, lahan kering dan lahan sawah

walaupun hanya serba sedikit, namun pemakaiannya belum optimal. Diantara ketiga bentuk lahan tersebut, lahan pekarangan memberikan penghasilan yang terbesar dalam satuan luas dan waktu.

### 3. Penduduk dan potensi sumberdaya manusia

Dalam Desa konteks pembangunan wilayah faktor kependudukan dipandang sebagai suatu sumberdaya yang paling penting dalam pembangunan, yaitu sebagai modal dasar (asset) pembangunan atau lebih populer dengan sebutan potensi sumberdaya manusia. Ketersediaan sumberdaya manusia tidak hanya dalam arti kuantitasnya, yaitu jumlah jiwa yang ada dalam sesuatu wilayah tetapi yang lebih penting justru adalah segi kualitasnya, di antara lain meliputi perihal dan kesehatan penduduk.

#### a. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Wilayah

Jumlah penduduk desa Sukoharjo menurut data tahun 1994 berjumlah sebanyak 2425 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1192 jiwa dan wanita 1233 jiwa. Jumlah kepala keluarga seluruhnya tercatat 5478 KK dengan tingkat kepadatan wilayah 62,81 jiwa/km<sup>2</sup>, yang seperti menurut ketentuan BPS dikategorikan ke dalam daerah (desa) dengan berpenduduk sangat jarang. Bilamana dikaitkan dengan ketersediaan sumberdaya yang ada maka indeks ini menunjukkan tingkat penggunaan lahan yang tergolong rendah dan sekaligus juga berarti sumberdaya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara terinci jumlah penduduk di desa tersebut berdasarkan komposisi menurut umur dapat dilihat seperti dalam Tabel 2. Dalam hal ini dapat pula diketahui jumlah penduduk yang dikategorikan berusia belum produktif (0-9 thn) yaitu, berjumlah 685 jiwa (28,20%). Sedangkan sisanya sebanyak 1740 jiwa (72,8%) dikategorikan penduduk berusia produktif, yaitu berumur antara (10 - 65 tahun). Jika dibandingkan antara kedua kelompok umur tersebut maka terlihat bahwa beban tanggungan penduduk desa ini relatif tidak begitu tinggi, yaitu sekitar 2,54 orang. Angka ini mengandung arti, setiap penduduk yang produktif di desa tersebut hanya menanggung kurang lebih 3 orang penduduk yang belum produktif.

Namun demikian, angka temuan ini perlu diwaspadai karena diantara penduduk usia produktif mencakup pula tentunya anak sekolah, penduduk wanita dan mereka yang menganggur. Lagi pula bila ditelusuri jumlah penduduk wanita yang ada di Desa Sukoharjo lebih banyak dari penduduk laki-laki. Kenyataan ini sudah barang tentu akan memperbesar rasio beban tanggungan tersebut, jika diantara penduduk wanitanya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1994.

Kelompok Umur	Jumlah	Persen (%)
0 - 4	256	10,56
5 - 4	429	17,56
10 - 14	524	21,61
15 - 19	187	7,71
20 - 24	140	5,77
25 - 29	105	4,33
30 - 34	103	4,24
35 - 39	119	4,91
40 - 44	138	5,69
45 - 49	122	5,03
50 - 54	107	4,41
55 - 59	121	4,98
di atas 60	74	3,20
J u m l a h	2425	100,00

Sumber : Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (diolah).

Kemudian, jika dilihat dari segi komposisi penduduk menurut mata pencaharian maka diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah sekitar 61% dari keseluruhan penduduk yang bekerja di desa tersebut. Suatu hal yang cukup menarik dalam temuan ini adalah relatif banyaknya jumlah penduduk yang berka atau mencari nafkah sebagai buruh kebun, yaitu kurang lebih 31% sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.



Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Matapencarian di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1994.

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persen (%)
Petani	651	61,0
Buruh Tani/Kebun	329	31,0
Pedagang	49	4,0
Tukang	19	1,8
Karyawan	14	1,3
Pegawai Negeri/ABRI	12	0,9
J u m l a h	1074	3,20

Sumber : Kantor Desa Sukoharjo, 1995.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, mereka yang bekerja sebagai buruh tani/kebun tersebut di atas umumnya berupa tenaga buruh harian di perusahaan perkebunan teh. Mereka bekerja dari pukul 7.30 pagi sampai 15.00 Wib sore hari, sebagai tenaga pemangkas/pemetik daun teh.

Apabila dikaitkan dengan luas lahan pertanian, mencakup persawahan dan perkebunan rakyat seperti disebutkan sebelumnya maka wilayah desa tersebut memiliki kepadatan agraris sebesar 0,44 per hektar. Indeks ini menunjukkan bahwa setiap 1 (satu) orang penduduk yang bekerja sebagai petani di desa Sukoharjo akan mengusahakan kurang lebih 2 (dua) hektar lahan pertanian atau perkebunan. Tinggi rendahnya indeks kepadatan agraris dalam suatu wilayah, di samping dapat disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang ada yang dipengaruhi oleh

kemampuan sidang kegiatan (sektor) di luar pertanian yang bersifat kegiatan off farm atau non farm, misalnya kegiatan industri rumah tangga dan jasa/buruh perkebunan.

Berdasarkan data pada tabel 3 juga diketahui bahwa, jumlah penduduk yang bekerja keseluruhannya tercatat sebanyak 1071 orang. Sementara jumlah keseluruhan angkatan kerja yang ada di wilayah desa tersebut, yaitu penduduk yang berumur antara (10 - 57) tahun berjumlah 1740 orang. Dengan demikian berarti jumlah penduduk desa Sukoharjo yang dikategorikan tidak bekerja adalah sebanyak 669 orang, atau kurang lebih 27,6% dari total penduduk yang ada. Ke dalam kategori ini termasuk anak sekolah, ibu rumah tangga,

#### **b. Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Pendidikan**

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada hakekatnya didasari bahwa setiap diri manusia hendaknya dapat dijadikan asset dan berperan dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan formal di pedesaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah agar potensi sumberdaya manusia tersebut dapat lebih berdaya guna ataupun meningkat kualitasnya.

Dilihat dari segi tingkatan dan ragam pendidikan formal yang dimiliki dan diperoleh penduduk desa Sukoharjo, kelihatannya sudah bervariasi mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, seperti terlihat pada Tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Ragam Pendidikan Penduduk Desa Sukoharjo  
Kecamatan Sangir, 1995

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
Tamat Perguruan Tinggi	2	0,59%
Tamat SLTA	154	6,35%
Tamat SLTP	368	15,17%
Tamat SD	798	32,90%
Belum Sekolah	306	12,61%
Tidak tamat SD	112	4,61%
Sedang sekolah	550	22,68%
Tidak pernah sekolah/ Buta aksara	135	5,09%
J u m l a h	2425	100,00%

Sumber : Hasil Survey, 1995

Di samping telah adanya ragam dan tingkatan pendidikan tersebut hasil penelitian juga menemukan sejumlah penduduk yang tidak pernah sekolah, dalam arti masih buta aksara sebanyak 235 orang atau sekitar 9,69% dari total penduduk desa Sukoharjo. Dari hasil wawancara diketahui, bahwa mereka ini umumnya adalah penduduk yang telah usia lanjut, ibu rumah tangga dan penduduk yang disebabkan oleh beberapa faktor belum dapat bersekolah pada masa lalunya.

Selanjutnya, bilamana dipelajari menurut komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang dikategorikan usia SD (7-12) tahun yang tinggal di desa tersebut terdapat sebanyak 477 orang dan mereka yang dikategorikan usia SLTP (13-15) tahun

berjumlah 212 orang. Sedangkan penduduk yang termasuk usia SLTA (16-19) tahun tercatat sebanyak 128 orang, dengan rincian seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sangir, 1994.

Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Bersekolah (Orang)	Tidak Sekolah (Orang)	Tingkat Part.Penddk (TPP)
4 - 6	240	--	--	
7 - 12	477	391	86	81,99
13 - 15	212	128	84	60,37
16 - 19	128	31	97	24,21

Sumber : Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (Diolah)

Hasil analisis terhadap Tingkat Partisipasi Pendidikan seperti terlihat dalam Tabel 5 diperoleh angka untuk jenjang pendidikan SD sebesar 84,24%. Bilamana angka ini dihubungkan dengan program wajib belajar Pendidikan Dasar 6 tahun tingkat partisipasinya sudah cukup tinggi, walau belum mencapai 100%. Sedangkan untuk tingkatan SLTP diperoleh angka sebesar 60,37% dimana sekaligus juga memperlihatkan adanya anak-anak dalam usia ini yang telah lulus SD tidak lagi meneruskan ke jenjang pendidikan SLTP. Sementara untuk usia SLTA diperoleh Tingkat Partisipasinya sebesar 24,12%, masih relatif rendah.

Berdasarkan Tingkat Partisipasi Pendidikan tersebut sekaligus juga tergambar jumlah atau persentase anak-anak pada setiap jenjang sekolah yang meninggalkan ataupun

tidak melanjutkan pendidikannya. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa diantara mereka yang dikategorikan kelompok putus sekolah atau tidak meneruskan pendidikan ini tertarik untuk bekerja di perusahaan perkebunan, sebagai tenaga kerja/buruh harian. Jadi, diantara penduduk desa Sukoharjo yang berstatus sebagai buruh tani seperti disebutkan terdahulu adalah mereka yang berusia sekolah yang tidak meneruskan pendidikan ataupun putus sekolah tersebut.

Secara implisit gambaran tingkat partisipasi pendidikan ini mengandung makna atau memberikan indikasi bahwa persepsi sebahagian masyarakat desa Sukoharjo terhadap pentingnya arti pendidikan bagi anak-anak mereka, masih relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan dan keadaan kehidupan ekonomi serta latar belakang pendidikan dikalangan para orang tua (masyarakat), yang kebanyakan tergolong sangat miskin dan berpendidikan relatif rendah. Selain itu, para orang tua di pedesaan memerlukan tenaga kerja dari dalam keluarga, termasuk anak-anak untuk membantu bekerja dan bahkan juga tidak jarang ikut mencari nafkah dalam upaya memenuhi atau meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Dengan demikian sudah barang tentu waktu anak untuk belajar akan tersita atau terbatas sama sekali, bahkan tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan.

Gambaran kenyataan di atas patut mendapat perhatian dan menjadi bahan pemikiran di dalam membuat rancangan kebijakan pembangunan desa tersebut di masa datang. Pada usia yang tergolong masih muda belia dimana seharusnya anak-anak diisi kemampuannya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan berbagai kegiatan sekolah lainnya. Akan tetapi kenyataan penghidupan dan kehidupan orang tua mereka menuntut lain sehingga memaksanya harus keluar meninggalkan sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Dengan kenyataan demikian sudah waktunya diperlukan daya upaya untuk mencarikan jalan keluar dan langkah-langkah yang kongkrit dalam menolong mereka dari ketertinggalan pendidikan dan pengetahuan. Disamping tetap dapat bekerja membantu penghidupan orang tuanya juga dapat meneruskan pendidikan dan pelajarannya. Jika hal ini dikaitkan dengan kepentingan tujuan pembangunan nasional, yaitu pengembangan sumberdaya manusia serta menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun maka diperlukan suatu sistem dan model penyelenggaraan paket-paket pendidikan masyarakat, dimana perlu adanya keterkaitan kegiatan antar Dinas/Instansi di dalam pelaksanaannya serta menyesuaikan isi program berdasarkan potensi wilayah dan dapat menunjang sisi kegiatan masyarakat setempat. Bagi pemakai jasa tenaga kerja, khususnya pihak perusahaan perkebunan yang relatif banyak memperkerjakan anak-anak dan masyarakat di wilayah desa ini diharapkan pula tidak hanya sekedar memakai dan

menguras fisik mereka yang bekerja tetapi juga ikut membantu dan membina serta mendidik supaya mereka menjadi berkualitas.

Selanjutnya, dari potensi sumberdaya wanita di desa Sukoharjo yang jumlahnya relatif lebih banyak dari laki-laki kondisinya masih berpendidikan rendah (umumnya tamatan Sekolah Dasar) dan bahkan diantaranya ada yang tidak tamat serta buta huruf. Hasil penelitian di lapangan juga menemukan banyak dikalangan mereka yang kawin pada usia muda, dalam arti belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada usia relatif muda mereka telah menyandang prediket sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembinaan dan penyuluhan terhadap mereka, selain mencakup segi kesehatan dan pengetahuan tentang kewanitaan serta kesejahteraan rumah tangga juga menyangkut aspek keterampilan dan kegiatan yang bersifat produktif.

Melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan yang bersifat produktif tersebut, seperti pemanfaatan lahan pekarangan yang banyak terlantar, usaha-usaha keterampilan dan kerajinan rumah tangga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan ekonomi atau pendapatan rumah tangga mereka.

#### **4. Potensi Sumberdaya Sosial dan Kelembagaan Pedesaan**

Sumberdaya sosial dan kelembagaan pedesaan adalah merupakan potensi atau daya dukung yang dapat menjamin

berlangsung dan lancarnya suatu proses pembangunan dalam suatu wilayah. Dalam konotasi lain faktor tersebut dapat meliputi atau mengandung makna aspek sosial budaya suatu masyarakat, yaitu diartikan sebagai sistem nilai budaya dan sistem tata kelakuan masyarakat.

Bagian terpenting dari sistem nilai budaya yang biasanya banyak dibicarakan dalam hubungannya dengan proses pembangunan yaitu adalah keadaan sikap mental anggota masyarakat untuk bereaksi dengan lingkungan, terutama terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selain dari itu juga dapat berupa konsepsi-konsepsi yang berkembang atau dianggap bernilai di dalam hidup, seperti sistem kepercayaan, sistem kekerabatan dan sebagainya. Sementara sistem tata kelakuan dapat terdiri atas, tipe masyarakat ataupun berupa kelembagaan yang berkembang di pedesaan. Untuk itu dalam memanfaatkan potensi sumberdaya sosial tersebut haruslah berorientasi kepada wilayah dimana sistem nilai budaya dan sistem tata kelakuan masyarakat bersangkutan berada.

#### a. Asal Usul Desa Sukoharjo

Ditinjau dari sejarahnya, masyarakat atau penduduk desa Sukoharjo ini asal mulanya adalah orang-orang Jawa yang bekerja sebagai kuli kontrak pada usaha perkebunan di masa penjajahan, yang datang oleh Pemerintah Belanda dari pulau Jawa. Mereka membuka lahan desa tersebut dahulunya adalah sebagai rentetan kejadian yang disebut "Peristiwa Bumi Hangus" yaitu aksi pembakaran lahan



perkebunan yang dilakukan oleh rakyat di daerah ini guna menghadapi dan berjuang melawan kaum penjajah.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, pada awalnya sekitar 15-17 kepala keluarga para kuli kontrak tersebut dengan tekad yang kuat, saling bahu membahu dan bekerja sama membuka dan merambah areal hutan serta mengerjakan lahan untuk berkebun, berladang dan bersawah guna dapat mengatasi kesulitan dan pahit getirnya kehidupan yang mereka alami pada masa itu. Mereka membuka dan mengerjakan lahan persawahan tujuannya tidak lain adalah mendambakan impian untuk dapat sekedar "makan nasi putih".

Wilayah atau daerah yang baru dibuka tersebut sepakat mereka beri nama Sukoharjo, yang berarti kurang lebih senang bekerja. Dari pengertian nama desa ini terkandung sesuatu makna pembangunan yaitu berupa semangat dan tekad yang kuat, bahwa mereka mempunyai ethos kerja yang tinggi. Hal mana mungkin disebabkan cerminan dari penderitaan hidup yang selama ini mereka alami, sesuai dengan fitrahnya sebagai "wong cilik" kuli kontrak perkebunan. Untuk itu mereka harus berjuang dan bekerja agar lebih dapat memperoleh kehidupan yang layak menurut ukuran pada saat tersebut.

Sampai saat penelitian ini dilakukan penduduk desa ini telah berkembang dari 17 KK sudah menjadi 48 KK, meliputi kurang lebih 35% penduduk suku Jawa dan sekitar 65% adalah berupa penduduk minang yang datang dari wilayah lainnya atau disekitar desa, seperti Muaralabuh



dan Painan. Pemekaran area perkampungannya sudah terdiri atas sejumlah dusun sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dilihat dari segi matapencaharian utamanya, tipe masyarakat desa ini dapat digolongkan kepada masyarakat bercocok tanam di ladang/kebun dan sawah. Menurut tipologi J.H. Steward, maka masyarakat dengan tipe demikian sistem dasar kemasyarakatannya adalah berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial sedang.

Tantanan nilai-nilai sistem masyarakat desa tersebut sesuai dengan komunitas yang ada bersumber pada dua kutub budaya yaitu kebudayaan suku Jawa dan suku Minangkabau dimana keduanya saling mengisi dan melengkapi sehingga dapat melahirkan pola hubungan sosial dan kekerabatan yang lebih baik. Masing-masingnya tidak saling menonjolkan kesukuan dan adat istiadat mereka. Sebagaimana halnya pola kemasyarakatan di pedesaan, disini juga memiliki sistem masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kesepakatan dimana setiap tindakan dan keputusan desa selalu di dalam proses musyawarah (melalui urun rembuk).

Namun demikian, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan sejumlah anggota masyarakat terungkap bahwasanya di tengah-tengah kehidupan mereka belum lagi ada tokoh panutan yang dapat menyatukan berbagai unsur-unsur dan potensi masyarakat. Jadi, beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat cenderung tidak melembaga dalam suatu bentuk kelompok-kelompok kerja. Dari struktur masyarakat-

nya, terlihat kecendrungan para generasi muda untuk memilih menjadi pekerja di perkebunan sebagai buruh ketimbang mengolah lahan pertanian atau perkebunan.

#### **b. Aspek Kelembagaan Pedesaan**

Seperti telah disebutkan bahwa kelembagaan merupakan faktor sentral bagi penggerak pembangunan pedesaan, disamping faktor sumberdaya lainnya. Sebagai suatu organisasi, kelembagaan dapat merupakan unit pengambil keputusan yang bersifat struktural dan bisa dirubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Hal mana pada gilirannya dapat melahirkan seperangkat aturan main tentang penguasaan, pemanfaatan dan transfer sesuatu sumberdaya. Selain itu, kelembagaan juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dan mempengaruhi pola tindak dan prilaku mereka sehari-hari.

Kelembagaan formal di pedesaan yang telah diperkenalkan dan diprakarsai oleh pemerintah saat ini adalah terdiri atas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Disamping itu, pada tingkat desa juga sering muncul suatu lembaga non formal yang dibentuk atas inisiatif masyarakat setempat dimana mereka berada.

##### **1). Kelembagaan Pemerintahan Desa Sukoharjo**

Aktivitas kelembagaan ini dilakukan oleh aparat pemerintahan desa, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala

Desa berperan sebagai pelopor utama dalam gerakan pembangunan ataupun pembaharuan di tengah masyarakat. Di samping itu juga berfungsi sebagai pemberi informasi, motivasi dan pelancar proses difusi serta membimbing masyarakat dan menyelaraskan antara prakarsa pemerintah dengan keinginan masyarakat yang dipimpinya. Kepala Desa harus mampu menerjemahkan program pembangunan sektoral ke dalam bentuk-bentuk program nyata yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa, aparat pemerintahan atau kelembagaan desa Sukoharjo belum begitu dapat mengaktualisasikan peran dan fungsinya. Hal ini terlihat melalui aktivitas pembangunan desa tersebut, yang relatif rendah. Disamping itu, pelaksanaan administrasi pemerintahan juga belum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebahagian administrasinya dilaksanakan di rumah Kepala Desa dan Sekretaris desa. Kemudian pendataan desa juga ditemukan masih belum sempurna, dimana beberapa data desa yang seharusnya ditampilkan dalam Tabel dan Diagram belum ditemukan sama sekali.

Aktivitas aparat pemerintahan desa, seperti frekuensi kunjungan ke luar wilayah desa, pertemuan rutin di kalangan tokoh dan berbagai unsur masyarakat tergolong rendah. Demikian pula keaktifannya di dalam menggerakkan partisipasi warga dan upaya untuk mengundang dan mendatangkan tenaga pembina dari Dinas/Instansi di Kecamatan. Selain itu juga tergambar dari ketiadaan

bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, baik formal maupun non formal berkembang di dalam wilayah desa bersangkutan seperti: KUD, P3A dan kelembagaan tani.

## 2). Kelembagaan Pembangunan

Salah satu kelembagaan pembangunan yang sudah dimiliki di tingkat bawah (grassroots) saat ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kelembagaan ini merupakan partner atau mitra Kepala Desa dalam menggerakkan dan mempercepat proses pembangunan di pedesaan. Sebagai wadah perencana dan pelaksana pembangunan serta penggerak partisipasi masyarakat, lembaga ini dilengkapi dengan sejumlah seksi-seksi antara lain yaitu: seksi pembangunan, seksi lingkungan hidup, seksi Agama, seksi P4, seksi Keamanan, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi pemuda, seksi kesejahteraan sosial dan seksi PKK.

Diharapkan melalui kelengkapan seksi-seksi ini organisasi LKMD yang telah dikembangkan bakal dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Namun dari hasil penelitian di lapangan terlihat belum begitu nampak peran kelembagaan tersebut, dimana masing-masing seksi kurang dapat mengaktualisasikan fungsi dan tugasnya. Hal ini terbukti dari rendahnya aktivitas pembangunan atau tidak banyak program dan proyek desa yang direalisasikan di dalam masyarakat. Padahal desa Sukoharjo cukup potensial dan sangat dimungkinkan dapat berkembang setaraf dengan desa-desa

lainnya yang tidak dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Seksi PKK misalnya, secara umum berperan membina dan mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga dan sumberdaya wanita pedesaan di dalam berbagai hal yang menyangkut keterampilan rumah tangga ataupun pemanfaatan lahan pekarangan yang dijumpai belum begitu optimal pengusahaannya. Begitu pula halnya seksi kesehatan dalam LKMD aktivitasnya boleh dikatakan relatif kurang. Hal mana terbukti melalui pengamatan tentang kurangnya kepedulian warga terhadap kebersihan/kesehatan dimana upaya-upaya untuk menggerakkan dan memotivasi warga agar supaya melengkapi rumahnya dengan sumber air bersih (sumur) dan MCK boleh dikatakan tidak ada, sehingga dijumpai hampir setiap rumah tidak tersedia sarana dan prasarana tersebut.

Demikian pula halnya dengan seksi-seksi yang lain dapat dikatakan belum berperan sesuai dengan yang diinginkan. Barangkali diduga erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia yang mengelola kelembagaan tersebut. Dari hasil penelitian terungkap bahwa rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya berpendidikan sekolah dasar. Inilah kendala yang dihadapi pemerintah selama ini di dalam memacu gerak pembangunan dan pemerintahan di pedesaan.

### 3). Kelembagaan Pertanian dan Ekonomi

Kelembagaan pertanian dan ekonomi pedesaan baik yang bersifat formal maupun in formal, seperti Koperasi

Pertanian, KUD, P3A dan kelompok tani belum lagi terbentuk atau dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Sukoharjo. Padahal bentuk-bentuk kelembagaan seperti demikian sangat penting artinya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui wadah P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) misalnya, sangat penting dan diperlukan dalam upaya pengelolaan ataupun peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi oleh para petani. Sebagaimana dari pengamatan di lapangan, terhadap sistem pengairan atau irigasi sawah yang ada, masih dijumpai tata air dan salurannya yang tidak lancar sehingga kurang terdistribusi dengan baik. Kondisi demikian pada akhirnya akan dapat memicu perselisihan dikalangan petani bilamana mereka tidak terkoordinasi dan berkumpul dalam suatu wadah yang dapat mempersatukannya.

Tidak hanya semata kepentingan irigasi persawahan, melalui kelembagaan P3A tersebut juga bakal berkembang sejumlah ide-ide di dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya air. Para petani dapat saling bertukar pikiran diantara sesama mereka dan begitu pula pihak penyuluh serta pembina akan lebih mudah puloa dalam melakukan aktivitasnya, sebab pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang efektif saat ini di Indonesia adalah melalui pendekatan kelompok petani.

Kelembagaan ekonomi pedesaan seperti Koperasi Pertanian (Koperta) dan Koperasi Unit Desa (KUD) atau kelembagaan keuangan pedesaan lainnya yang bersifat

tradisional tidak dijumpai di dalam wilayah desa bersangkutan. Pada prinsipnya kelembagaan seperti ini sangat penting artinya di dalam menyatukan kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan, karena mereka memiliki kesempatan dan peluang dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan maupun dalam mendapatkan berbagai input produksi.

Selanjutnya, bilamana ditinjau dari keberhasilan suatu pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nagamine (1975) akan sangat tergantung pada economic viability dan sosiopolitical acceptability, sementara kedua faktor ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan (institutions factor). Jadi, kelembagaan merupakan faktor sentral yang berpengaruh terhadap semua faktor dimana antara lain dapat berupa faktor kepemimpinan dan partisipasi di pedesaan serta kebebasan dan norma tradisional manusia. Sementara dari pandangan sosiologi yang menempatkan sisi potensi sumberdaya sosial diantaranya mengajukan strategi pembangunan berparadigma struktural fungsional, memandang bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai dengan optimal melalui partisipasi luas anggota masyarakat terutama di tingkat komunitas-komunitas berdasarkan prosedur demokratis dan kerja sama sukarela (locality development), menempatkan pendidikan sebagai sarana terpenting untuk mencapai tujuan (normative reeducative) dan menganjurkan pembangunan gotong royong di atas kekuatan kaki sendiri (self help). Di dalam menghadapi perubahan-perubahan,



strategi pembangunan ini memandang perlu hadirnya para agen perubahan (agent of social change) yang diharapkan dapat menjadi pembimbing bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan adaptasi masyarakat.

## **5. Potensi Sumberdaya Air dan Hutan**

Selain dari sejumlah potensi sumberdaya pembangunan seperti telah disebutkan di atas terdapat lagi beberapa potensi sumberdaya lainnya, antara lain yaitu: sumberdaya air, sumberdaya hutan, dan objek wisata alam.

### **a. Potensi Sumberdaya Air**

Air merupakan sumberdaya alam atau komoditas yang sangat penting dan mutlak bagi kehidupan, tidak hanya untuk kelangsungan hidup manusia belaka tetapi juga bagi kebutuhan hidup hewan dan tumbuhan ataupun tanaman. Ditinjau dari ketersediaannya, potensi sumberdaya air desa Sukoharjo relatif memadai terutama potensi alamiah air sungai dan rawa. Hanya saja karena letak wilayahnya cukup tinggi di atas permukaan laut dengan topografi dari datar sampai berbukit, sehingga menyebabkan di beberapa tempat kondisi alamiah air tanahnya relatif dalam dan agak sulit, terutama sekali pada musin kemarau.

Di dalam wilayah desa ini mengalir sungai dan anak sungai masing-masing yaitu, sungai Batang Air Manyuruk, Batang Liki, Batang Sapan Kecil dan Batang Sapan Besar serta Batang Mangku. Di atas bertangan persawahan rakyat terdapat pula potensi air dalam bentuk jaringan-jaringan atau saluran air irigasi untuk kepentingan pengairan.

Menurut Dinas Pertanian Kecamatan, diperkirakan dari potensi tersebut mengairi areal persawahan sekitar 1500 ha. Kemudian dari potensi sumberdaya air yang ada juga telah dimanfaatkan oleh beberapa rumah tangga untuk kepentingan Pembangunan Listrik Tenaga Air perantaraan Kincir Air Tradisional. Dari hasil penelitian di lapangan, terdapat dua unit PLTA Mikro sistem Kincir di desa tersebut dengan daya 2-3 Kilowatt.

Pemanfaatan potensi sumberdaya air yang telah ada tersebut belum lagi optimal dan efisiensi, artinya masih dapat ditingkatkan baik dari segi ekonomi maupun teknis. Untuk keperluan irigasi misalnya, diperlukan pembenahan dan perbaikan saluran airnya agar lebih lancar dan tidak banyak terbuang. Pengelolaan (manajemen) tata air perlu ditingkatkan, sehingga pengaturan dan pemakaiannya sesuai menurut kebutuhan serta terdistribusi (agihan) yang lebih merata.

Demikian pula dalam hal pemanfaatan untuk kepentingan energi alternatif (sumber penerangan) masih mungkin untuk ditingkatkan baik melalui pengembangan atau penambahan sistem pembangkit baru maupun upaya meningkatkan efisiensi yang telah terpasang.

Kemudian dari segi pemanfaatannya untuk konsumsi rumah tangga termasuk MCK, hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya mereka lebih banyak tergantung kepada sumber air sungai dan saluran-saluran irigasi untuk memenuhi keperluan ataupun konsumsi sehari-hari. Sikap dan perilaku masyarakat mengkonsumsi air seperti demikian

dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, apalagi jika airnya sudah tercemar. Dari informasi yang diperoleh di lapangan di desa tersebut pernah terserang dan berjangkitnya muntaber pada beberapa tahun belakangan. Barangkali hal ini mungkin disebabkan atau ada kaitannya dengan masalah pengonsumsi air minum pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi air di wilayah desa ini terdapat suatu sumber sekitar 1 km dari areal pemukiman masyarakat, serta cukup potensial dikembangkan untuk sumber air bersih. Saat penelitian ini dilakukan telah direncanakan proyek pengadaan sarana air bersih tersebut melalui dana Pembangunan Program Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).

Khusus untuk pemanfaatan potensi air dalam bidang perikanan dan peternakan, seperti usaha kolam ikan dan beternak itik atau kombinasi keduanya sudah mulai diusahakan oleh beberapa rumah tangga. Hanya saja masih bersifat tradisional dan kurang begitu terawat. Ketika ditanyakan terhadap sejumlah warga desa kenapa tidak mau mencoba memanfaatkan beberapa lahannya ke arah usaha tersebut. Pada umumnya mereka mengemukakan belum pernah atau tidak biasa dan tambahan lagi tidak adanya penyuluhan dan bimbingan. Disamping itu kelihatannya warga masyarakat kurang berani dan takut beresiko serta terbatasnya modal usaha. Keadaan demikian wajar karena, sebagaimana biasanya masyarakat pedesaan yang sudah menyatu hidupnya dengan sistem pertaniannya sangat maka faktor keterikatan sebagai petani pada usaha pertaniannya

sangat erat sekali. Dengan demikian dalam menerima hal-hal yang baru mereka akan bersikap hati-hati dan skeptis, sebab mereka memiliki prinsip hidup dahulukan selamat (Scott:1981).

#### **b. Potensi Sumberdaya Hutan dan Lainnya**

Kawasan hutan di wilayah desa Sukoharjo seperti telah disebutkan sebelumnya relatif luas, yaitu mencapai kurang lebih 3678 ha yang terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat, masing-masing seluas 2478 ha dan 1200 ha.

Di dalam kawasan hutan ini terdapat sejumlah besar potensi sumberdaya hutan seperti, kayu, damar, rotan, enau dan berbagai kekayaan (resource endowment) lainnya baik flora maupun fauna yang tidak terhitung banyaknya. Kesemuanya ini tidak hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah desa bersangkutan tetapi juga di luar wilayah tersebut, bahkan juga bagi kepentingan manusia pada umumnya.

Dari beberapa sumber yang diterima, dahulu sebelum adanya pelarangan penebangan dan pengambilan kayu, dari kawasan hutan tersebut dihasilkan sejumlah besar kayu balok untuk keperluan ekspor dan industri penggergajian kayu. Areal hutan ini pada waktu itu berfungsi atau bersifat sebagai hutan produksi yang dipegang dan dikuasai oleh perusahaan HPH namun sekarang izin operasi dan penguasaannya sudah dicabut. Tindakan ini dilakukan pemerintah guna menjaga kelestarian lingkungan (potensinya) serta tingkat keseimbangan dan kesuburan

tanah pertanian dalam wilayah desa bersangkutan.

Kemudian, potensi alam lainnya yang terdapat di wilayah desa ini yaitu berupa sarang burung layang-layang di sela cadas bukit pebatuan dan mulut goa. Dari keterangan masyarakat setempat di salah satu bukit pebatuan tersebut ada sebuah terowongan/goa sepanjang 800 m di dalamnya mengalir air, yaitu tempat aliran air dari sebuah anak sungai yang mereka namakan Sungai Air Manyuruk dan sekaligus sebagai nama salah satu dusun yang ada di desa tersebut.

Kesemua potensi sumberdaya alam ini pada hakekatnya berupa anugerah bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, karenanya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber tersebut diperlukan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi, meliputi dimensi manusia, alam, teknologi dan lingkungan sehingga tetap dapat lestari serta berkelanjutan (sustainable).

## 6. Kondisi Infrastruktur Pedesaan

Untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan seperti biasanya diperlukan sejumlah fasilitas penunjang dan pelayanan kegiatan, baik yang menyangkut bidang produksi, pengolahan dan pengangkutan hasil maupun bidang yang menyangkut aspek pendidikan dan pelayanan kesehatan serta sosial lainnya. Dari hasil survey terhadap beberapa fasilitas tersebut yang ada di desa Sukoharjo diperoleh gambaran kondisinya sebagai berikut:

#### a. Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan meliputi prasarana jalan dan sarana angkutan adalah sangat penting bagi pemindahan komoditas dari produsen ke konsumen, artinya semakin baik kondisi prasarana jalan yang ada maka semakin mudah pula perpindahan barang-barang komoditas yang dihasilkan desa bersangkutan. Demikian pula dengan ketersediaan sarana angkutan, akan sangat membantu bagi pemasaran komoditas dari suatu wilayah. Selain itu juga akan memperlancar atau meningkatkan mobilitas penduduk masuk dan keluar wilayah desa tersebut.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa jalan yang ada saat ini di desa Sukoharjo, yaitu berupa jalan desa sepanjang 6 km dengan lebar sekitar 3 m kondisinya dalam rusak, sukar dilewati kendaraan roda empat. Permukaan jalan di beberapa tempat berlumpur dan berlobang sehingga menghambat kelancaran transportasi pengangkutan hasil (output) desa. Untuk mencapai jalan utama, yang menghubungkan desa ini dengan pusat-pusat pelayanan di tingkat kecamatan atau pasar terdekat pada umumnya masyarakat berjalan kaki. Demikian pula halnya dalam mengangkut komoditas hasil usaha pertanian, mereka melakukannya dengan memikul dan menggendong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu-ibu ketika hendak membawa hasil pertanian mereka, seperti beras, kulit manis, sayuran dan sebagainya tentang biaya transportasi yang dikeluarkan sampai mencapai pasar terdekat (Pasar desa Sei. Lambai) yaitu adalah sebesar

Rp. 250,- tiap orang, sedangkan ongkos angkut barang (beras) rata-rata Rp. 250,- per karung seberat 40 kg. Menurut mereka ongkos tersebut tidak terlalu memberatkan, dan sulitnya justru menangkut dan membawa barang atau komoditas tersebut dari rumah sampai ke tepi jalan utama.

Selain dengan berjalan kaki, mereka kadang-kadang juga menggunakan sarana angkutan sepeda mencapai pinggiran jalan tersebut. Dari hasil pencatatan di lapangan jumlah sepeda yang ada saat ini di desa ini adalah sebanyak 90 buah, sedangkan sepeda motor dari bermacam merek berjumlah 8 buah.

Ditinjau dari sisi kondisi sarana dan prasarana perhubungan demikian, terutama menyangkut faktor fisik jalan desa yang dipandang sebagai salah satu penyebab ketertinggalannya dibanding desa-desa lain di Kecamatan Sangir. Sampai dengan akhir penelitian ini dilaksanakan, prasarana jalan desa tersebut sudah di mulai pengerjaan pengerasannya melalui bantuan dana Pembangunan Program Penunjang Desa Tertinggal. Hanya saja dari teknis pengerjaannya masih belum sempurna karena bahagian pinggir kiri kanan jalan tidak dilengkapi atau dibangun parit-parit (saluran air) yang permanen/dicor dengan semen, sehingga dimungkinkan cepat runtuh akibat pengikisan aliran air. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, hal ini terpaut dengan bantuan dana yang terbatas jumlahnya. Mudah-mudahan dengan selesainya proyek peningkatan jalan desa ini bakal dapat memperlancar roda perekonomian masyarakat setempat dan

sekaligus membuka keterisolasiannya.

#### b. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Sarana sosial bidang pendidikan yang terdapat di desa Sukoharjo sampai saat ini baru hanya pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah sebanyak 2 buah, masing-masing terletak di dusun Karang Putih dan dusun Air Manyuruk.

Ditinjau dari sisi fasilitas ruang kelas yang tersedia jumlahnya cukup memadai. Hanya saja jumlah guru kelas masih belum mencukupi (kekurangan) sehingga didapati guru-guru tersebut harus bertugas/mengajar secara rangkap, dalam artian memegang kelas ganda. Secara lengkap jumlah dan data tentang tenaga guru yang ada dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Keadaan Pendidikan Tenaga Guru Sekolah Dasar di Desa Sukoharjo, 1995.

Jenjang Pendidikan Guru	Jumlah (Orang)	Ket.
Kursus Pendidikan Guru (KPG)	2	
Sekolah Pendidikan Gur (SPG)	7	
Pendidikan Guru Agama (PGA)	1	
Sekolah Guru Olahraga (SGO)	1	

Sumber: Hasil Survey, 1995.

Bilamana ditelusuri tentang keadaan guru-guru tersebut ternyata keseluruhannya sudah berstatus Pegawai Negeri dan bertugas menjadi guru selama 12-22 tahun. dari jumlah tenaga pendidik tersebut sudah mencakup Kepala



Sekolah beserta Wakilnya untuk dua sekolah SD yang ada. Ini berarti Kepala Sekolah harus bertugas langsung sebagai guru kelas disamping Jabatan Administrasi yang dijalankannya. Sementara keadaan jumlah murid yang ada saat ini untuk masing-masing Sekolah tersebut adalah berjumlah 206 orang dan 185 orang atau total sebanyak 491 murid. Jika dirinci menurut tingkatan kelas maka berarti setiap kelasnya berisi murid sebanyak kurang lebih 40 orang, dan cukup ideal sesuai menurut ukuran kapasitas yang ditetapkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebanyak 45 orang (maksimum).

Memperhatikan kondisi tenaga guru seperti demikian yang cukup memperhatikan baik jumlah maupun sisi pendidikan mereka maka sudah sewajarnya pihak instansi terkait menetapkan suatu kebijakan dalam hal pengadaan guru serta upaya untuk meningkatkan kualitas dari guru-guru yang telah ada saat ini sehingga kekurangan akan tenaga tersebut dapat teratasi. Ditambah lagi dalam menyukseskan program pemerintah tentang wajib belajar (wajar) 9 tahun, yang penyelenggaraannya diantara lain dapat dilakukan di sekolah dasar bersangkutan, jika tenaga pengajar dapat terpenuhi persyaratannya.

Untuk sarana pendidikan SMP dan sederajat belum lagi tersedia di desa tersebut sehingga masyarakat harus menyekolahkan anak-anaknya keluar dari desa Sungai Lambai atau langsung di Ibu Kecamatan yang berjarak 12 km. Begitu juga untuk pendidikan SLTA mereka menyekolahkan selain di Ibu Kecamatan Lb. Gadang juga sampai ke Pasar

Muaralabuh sejauh kurang lebih 75 km.

Adapun untuk sarana bidang kesehatan, di desa ini sudah ditempatkan Bidan Desa untuk melayani kesehatan masyarakat, khususnya Ibu dan Anak. Sampai dengan akhir penelitian ini dilakukan, fasilitas rumah bidan sekaligus tempat prakteknya masih dalam taraf penyelesaian pembangunannya. Untuk semester Bidan tersebut menempati salah satu fasilitas rumah guru SD yang terletak di dusun Air Manyuruk.

Kemudian, fasilitas fisik lainnya yang dapat menunjang sisi kesehatan masyarakat yaitu berupa lapangan olah raga seperti: Bola kaki, Bola Volley, Takraw, Bulu tangkis dan Tenis Meja. Kesemua aktivitas keolahragaan ini merupakan salah satu bentuk kepemudaan yang dikelola atau di wadahi oleh Karang Taruna.

### c. Infrastruktur Pertanian dan Ekonomi

Prasarana fisik di bidang pertanian, khususnya persawahan rakyat dalam hal ini sudah dilengkapi dengan pengairan, yaitu berupa irigasi bersifat sederhana, semi teknis, dan teknis. Sampai saat ini prasarana irigasi tersebut masih belum mampu mengairi keseluruhan areal persawahan yang ada di desa Sukoharjo, yaitu hanya meliputi persawahan di tiga buah dusun masing-masing adalah : Dusun Air Manyuruk, Karang Putih dan Dusun Bumi Ayu.

Selain berupa fasilitas pengairan tersebut, di desa ini juga sudah terdapat sebanyak 5 unit mesin giling padi

(rice milling unit) yang dikelola secara pribadi oleh masyarakat setempat. Disamping itu, juga sudah ada satu mesin traktor tangan (hand tractor machines) serta beberapa bajak yang mempergunakan tenaga kerbau untuk pengolahan lahan persawahan.

Kemudian, sarana perekonomian lainnya yaitu berupa pasar sebagai tempat transaksi hasil-hasil pertanian masyarakat belum tersedia di desa tersebut. Untuk keperluan jual beli mereka harus melakukannya di pasar desa yang terdekat, seperti pasar desa Sei. Lambai dan desa Liki atau pergi ke pasar Kecamatan di Padang Aro. Disamping itu, juga terdapat sarana ekonomi lainnya yaitu berupa warung/kedai sebanyak 8 buah di desa bersangkutan. Kehadirannya terlihat lebih tertuju dalam memenuhi konsumsi rumah tangga daripada untuk penyediaan kebutuhan sarana produksi atau keperluan usaha pertanian, seperti pengadaan pupuk ataupun racun hama tanaman dan sebagainya.

Berdasarkan informasi masyarakat setempat, terkadang-kadang mereka juga memanfaatkan warung ini sebagai tempat tukar menukar komoditas hasil pertaniannya melalui sistem pasar tradisional (prinsip barter). Informasi ini juga diperkuat berdasar pengalaman mahasiswa IKIP Padang yang pernah melakukan KKN di desa tersebut.

d. Kondisi Rumah Penduduk dan Fasilitas Sosial Lainnya.

Kondisi rumah penduduk serta bangunan fasilitas sosial di desa Sukoharjo terlihat sudah bervariasi, mulai dari berbentuk rumah kayu sampai yang bersifat permanen (beton). Secara terinci jumlah dan jenisnya dapat diperhatikan seperti dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan Jenis Rumah Penduduk di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1995

Jenis Rumah	Jumlah	Persen (%)
Permanen	24	4,88
Semi permanen	224	45,62
Kayu	243	49,50

Sumber: Hasil Survey, 1995

Ditinjau dari segi kebersihan dan kesehatan seperti kebanyakan rumah di pedesaan dalam hal ini dijumpai masih jauh dari yang diharapkan, dimana hampir setiap rumah warga tidak dilengkapi dengan sarana MCK. Barangkali hal tersebut berkaitan dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri serta kesadarannya merawat dan menjaga kebersihannya.

Fasilitas sosial lainnya yang terdapat di desa Sukoharjo yaitu adalah berupa rumah ibadah, seperti masjid yang berjumlah sebanyak 6 buah serta mushalla sebanyak 2 buah. Kondisi dari masing-masing sarana ibadah ini cukup terawat serta terpelihara, terutama Masjid. Hal ini dapat dimaklumi karena sarana rumah ibadah tidak hanya semata tempat beribadah menunaikan shalat tetapi

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

juga sebagai tempat bermusyawarah bagi warga desa.

### **B. Potensi Desa dan Pola Usaha Masyarakat**

Sebagaimana dikemukakan oleh Todaro (1983), andaikata tujuan utama dari pembangunan desa dan pertanian dalam suatu negara yang sedang berkembang itu adalah untuk memperbaiki tingkat hidup di pedesaan, maka hendaklah dengan cara memperbaiki pendapatan petani yaitu melalui peningkatan output (produksi) desa yang sekaligus merupakan produktivitas masyarakat pedesaan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka desa-desa yang masih bergerak di sektor pertanian dalam artian yang luas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dapat dipakai sebagai output desa dan sekaligus mengukur tingkat kemajuan ataupun pembangunan desa bersangkutan. Dalam analisis klasifikasi pembangunan desa oleh Biro Pusat Statistik, produksi (output) desa adalah merupakan jumlah dari keseluruhan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam satu tahun yang dinilai dalam satuan rupiah.

Untuk keperluan penelitian ini akan ditelusuri dan dipelajari produksi hasil-hasil pertanian masyarakat desa Sukoharjo sebagai gambaran dari output desa bersangkutan dan sekaligus juga mengamati berbagai bentuk kegiatan serta pola pengusahaan sesuai dengan jenis komoditas yang dihasilkan.

## 1. Potensi dan Pola Usaha Pertanian

Produksi dan pola usaha pertanian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukoharjo dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, khususnya menyangkut usaha tani sawah dan lahan kering.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dilakukan di atas lahan persawahan, yaitu terdiri dari sawah beririgasi teknis seluas 296 ha, beririgasi setengah teknis 254 ha, dan sawah tadah hujan seluas 23 ha.

Ditinjau dari segi pola usaha tani (farming system), kesemua lahan persawahan tersebut hanya ditanami padi sawah dengan musim tanam rata-rata dua kali dalam setahun. Mereka pada umumnya belum mengenal ataupun melakukan pola pergiliran tanaman sebagaimana yang banyak dijumpai dan diusahakan oleh para petani di pedesaan lainnya, seperti di pulau Jawa misalnya: mereka mengusahakan pergiliran untuk lahan sawah irigasi teknis biasanya (padi-tembakau-palawija), untuk sawah setengah teknis (padi-tembakau-jagung) dan pada sawah tadah hujan digilirkan antara (pad-padi-palawija).

Sebagai salah satu bentuk teknologi, pola usaha tani tersebut mempunyai pengaruh sosial ekonomi yang cukup kuat terutama dalam upaya peningkatan pendapatan petani tiap satuan luas per satuan waktu serta penyerapan tenaga kerja di dalam usaha tani. Hanya saja terlihat para

petani di desa tersebut lebih terikat pada cara dan pola usaha yang selama ini mereka geluti. Ditambah lagi tidak adanya bimbingan dan penyuluhan yang mereka terima dari tenaga penyuluhan lapangan (pihak pertanian), sehingga adopsi teknologi dalam bidang usaha tani padi sawah ini agak lamban dibanding dengan daerah lainnya.

Demikian pula dalam hal pemakaian input teknologi, mereka boleh dikatakan hampir tidak melakukan teknologi pemupukan dan pengendalian hama tanaman. Sampai saat ini di desa tersebut belum lagi diperkenalkan atau dijumpai program-program intensifikasi padi sawah, baik berupa paket intensifikasi umum (inmum), insus maupun supra insus sebagaimana ditemukan di desa-desa persawahan lain di Sumatera Barat.

Kemudian dari segi penggunaan faktor produksi tetap, dalam hal ini kelihatannya mereka sudah memanfaatkan tenaga ternak untuk mengolah lahan walau tidak merata. Saat penelitian ini dilakukan juga sudah dijumpai salah seorang di antara warga masyarakat memiliki traktor tangan. Kehadiran teknologi pengolahan lahan melalui tenaga mekanik tersebut menurut perangkat desa Sukoharjo cenderung menarik minat masyarakat, sehingga di antara mereka sudah ada yang memanfaatkan jasa penyewaan traktor ini dari pemiliknya. Namun demikian untuk mengetahui seberapa besar keuntungan dan manfaatnya baik secara teknis maupun ekonomis dibandingkan dengan tenaga lainnya perlu diteliti dengan saksama di lapangan.

Selanjutnya dari penanganan teknologi pasca panen, pada umumnya para petani sudah mengenal dan memanfaatkan alat pembersih gabah (lumbo atau winower). Namun untuk mesin perontok gabah (thresher) belum dijumpai penggunaannya, sehingga teknologi pengolahan atau penanganan gabah yang berkembang dikalangan petani yaitu teknologi banting, mengisai dan menampi serta lumbo seperti telah disebutkan tadi.

Selain di lahan persawahan, usaha pertanian di desa Sukoharjo juga dilakukan masyarakat di atas lahan kering baik berupa tegalan dan pekarangan maupun perladangan. Luas lahan yang tersedia masing-masing tercatat untuk usaha pekarangan dan pemukiman seluas 119 ha sedangkan ladang ataupun tegalan seluas 226 ha.

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan, ternyata dari keseluruhan luas lahan yang tersedia tersebut tidak semuanya dimanfaatkan saat ini. Ini ditunjukkan masih terdapat lahan yang kosong atau ditinggalkan tidak lagi ditanami oleh masyarakat dengan yang produktif. Jika diamati, pada umumnya mereka mengusahakan lahan kering dan tegalan ini untuk bertanam sayur-sayuran dan palawija. Namun demikian, dari hasil pengamatan peneliti bentuk kegiatan dan usaha masyarakat dalam bidang ini belum begitu berkembang. Artinya, hasil yang mereka peroleh masih begitu ditujukan untuk pemenuhan konsumsi daripada orientasi pasar (dijual).



Untuk mengetahui beberapa jenis komoditas yang dihasilkan serta sumbangan desa Sukoharjo terhadap produksi bidang pertanian ini dapat dilihat seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Produksi Padi, Palawija dan Sayur Mayu di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1994

Jenis Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Padi	570	2040	3,57
Jagung	13	25,6	1,96
Kedele	1	1,5	1,50
Ketela Pohon	10	200	20,00
Ketela Rambat	0,5	5,1	10,20
Ketela Tanah	24	35	1,45
Kentang	0,5	8,0	16,00
Tomat	1,5	--	--
Kacang Panjang	2	3	1,50
Terong	1,3	2,7	2,08
Buncis	4	7	1,75
Bawang Merah	3	--	--
Ketimun	1	1,5	1,50
Cabe	1	2,0	2,00

Sumber : Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (diolah)

Berdasarkan data dalam Tabel 8 dapat diketahui beberapa jenis komoditas yang dihasilkan dari desa tersebut serta sekaligus tergambar jenis usaha dan tanaman apa yang relatif banyak digeluti oleh para petani

di desa bersangkutan. Beberapa di antaranya yaitu, padi, jagung, ketela pohon dan kacang tanah.

Untuk usaha tani padi sawah misalnya, produksi yang dihasilkan dalam setahun adalah 2040 ton dengan luas panen 570 ha dan mempunyai tingkat produktivitas lahan sebesar 3,57 ton/ha. Dibandingkan dengan produksi padi di Kecamatan Sangir sumbangannya adalah sekitar 8,4% dari jumlah produksi sebesar 24267 ton dan mempunyai produktivitas lahan rata-rata 5,04 ton/ha.

Relatif rendahnya tingkat produktivitas usaha tani padi sawah di desa tersebut dibanding rata-rata di tingkat Kecamatan, diantara lain dapat disebabkan oleh penggunaan input teknologi yang tidak sama atau juga dapat akibat pengaruh pengelolaan lahan dan pengendalian hama tanaman serta penanganan pasca panen yang diduga masih dibawah (kurang) dari teknologi di pedesaan lainnya dalam Kecamatan Sangir.

Hal ini terbukti dari hasil pengamatan dan wawancara dengan sejumlah petani, dimana mereka pada umumnya tidak melakukan pemupukan pada setiap musim tanam yang dilakukannya. Ketika ditanyakan kenapa alasannya, kebanyakan mereka menjawab tidak seimbang (beli pupuk mahal) dan sebagian juga mengemukakan bagaimana cara pemberian pupuk yang baik, sementara kami tidak mendapat penyuluhan. Sementara itu dari sisi kelembagaan pertanian juga kurang mendukung di dalam upaya pemberian bimbingan dan penyuluhan ini karena belum ada bentuk-bentuk kelompok tani atau kelompok hubungan kerja antar petani

sehingga menyebabkan sulitnya bagi pihak penyuluh lapangan memperkenalkan berbagai bentuk input teknologi kepada para petani.

Komoditas lainnya yang juga relatif banyak diusahakan atau ditanam oleh masyarakat desa Sukoharjo adalah kacang tanah, yaitu seluas 24 ha dengan produksi sebanyak 35 ton dalam tahun 1994. Untuk jenis tanaman kacang tanah ini wilayah Kecamatan Sangir merupakan penyumbang terbesar terhadap produksi komoditas tersebut di daerah Kabupaten Solok, yaitu mencapai 539,2 ton untuk luas panen 300 ha dengan produktivitas lahan sekitar 1,8 ton/ha. Ini berarti kurang lebih 6,5% diantaranya berasal dari produksi kacang tanah di desa Sukoharjo. Sementara tingkat produktivitasnya sedikit lebih rendah dibanding rata-rata produktivitas di tingkat Kecamatan, yaitu 1,45 ton/ha.

Selain dipengaruhi oleh tingkat produktivitas, relatif kecilnya kontribusi produksi kacang tanah ini terhadap daerah Kecamatan juga disebabkan masih sedikitnya areal tanam komoditas tersebut diusahakan oleh masyarakat. Apabila dihubungkan dengan jumlah tiap rumah tangga hanya menanam dan mengusahakan sekitar 0,05 ha lahan. Atau dapat pula mengandung arti, bahwa belum semua rumah tangga di desa ini mengusahakan tanaman kacang tanah tersebut.

Padahal dari segi kondisi dan ketersediaan lahan, cukup potensial untuk pengembangan usaha tanaman ini. Lagi pula dari segi teknis pengusahaannya, aktivitas

penanaman pada hakekatnya dapat dilakukan oleh para ibu rumah tangga sebagai usaha tanaman lahan pekarangan atau tegalan. Akan tetapi, kecendrungan para ibu rumah tangga dan kaum wanita di desa ini lebih tertarik bekerja sebagai buruh harian di perusahaan teh yang berlokasi di desa-desa tetangga sekitarnya. Sebagai salah satu dampaknya banyak ditemukan lahan pekarangan yang tidak diolah untuk usaha yang lebih produktif.

Selanjutnya, jenis komoditas yang juga relatif banyak pengusaha dan penanamannya yaitu adalah jagung dan ketela pohon (ubi kayu) masing-masing seluas 13 ha dan 10 ha, dengan produksi 25,6 ton serta 200 to untuk penanaman dalam tahun 1994. Kedua jenis komoditas ini mempunyai tingkat produktivitas yang tidak begitu berbeda dengan rata-rata produktivitas di tingkat Kecamatan Sangir. Untuk jagung mempunyai tingkat produktivitas sebesar 1,96 ton/ha sedangkan ubi kayu 20,00 ton/ha. Sementara di tingkat kecamatan produksi jagung sebesar 248,2 ton dan ubi kayu 2493,9 ton pada tahun yang sama, dengan tingkat produktivitas masing-masing untuk jagung sebesar 2,14 ton/ha dan ubu kayu sekitar 20,12 ton/ha.

Dari produksi di tingkat Kecamatan tersebut desa Sukoharjo ternyata hanya memberi kontribusi Jagung 10,29% dan ubi kayu sebesar 8,41%. Relatif rendahnya sumbangan komoditas ini terutama disebabkan karena masih kecilnya luas tanam yang diusahakan oleh masyarakat. dari pengamatan di lapangan masih terlihat adanya beberapa areal lahan kering dan tegalan yang kosong atau tidak

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

berisi tanaman, khususnya jagung. Di samping disebabkan oleh karena faktor tersebut, juga berkaitan dengan pemasaran hasil terutama untuk ubi kayu sesuai menurut ungkapan para petani yang sempat diwawancarai di lapangan. Mereka menanamnya lebih mengutamakan keperluan rumah tangga baik untuk diambil pucuknya dijadikan sayur maupun isi (umbi) sebagai panganan.

Khusus untuk berbagai komoditas sayur mayur seperti di lihat dalam Tabel 9, desa bersangkutan boleh dikatakan belum begitu besar sumbangannya terhadap produksi sayuran di Kecamatan Sangir. Dari pengamatan terlihat begitu renggangnya tanaman sayur mayur ini di lahan pertanian masyarakat, baik di atas tegalan, pekarangan maupun di pematang sawah. Menurut ibu rumah tangga yang sempat diwawancarai, mereka mengemukakan bahwa menanamnya sekedar untuk makan dan lagi pula di pasar desa cukup banyak pesaing jika dijual. Kalau ditelusuri pasar-pasar desa atau Kecamatan, memang cukup banyak dijumpai sayur-sayuran dijual oleh pedagang, yang dibawa dari Alahan Panjang dan Kerinci yang memang sudah terkenal sebagai sentra produksi sayur selama ini.

## **2. Potensi dan Pola Usaha Perkebunan**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber mata pencaharian masyarakat Sukoharjo, selain bersawah juga berkebun. Mereka membuka dan mengerjakan lahan perkebunan pada kawasan pinggiran desa, di lereng-lereng kaki pebukitan serta di bahagian areal sebelah kiri jalan

raya menuju ke Ibu Kecamatan dan Kabupaten Kerinci. Selain itu juga didapati usaha kebun mereka di sekitar rumah, terutama bagi yang memiliki lahan pekerangan yang relatif luas.

Di dalam lahan perkebunan tersebut mereka menanam tanaman produksi (tahunan) serta buah-buahan, antara lain adalah : kulit manis, kopi, pisang, karet, kelapa dan sebagainya. Pola pengusahaannya kelihatan tidak banyak berbeda dengan usaha perkebunan oleh petani di desa-desa lainnya, dimana pada satu lahan tersebut ditanami berbagai jenis tanaman. Untuk usaha tanaman kopi misalnya, mereka gabung dengan tanaman pisang, kulit manis, kelapa dan bahkan juga karet.

Untuk mengetahui luas dan produksi beberapa jenis komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat desa Sukoharjo tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.

Tabel 9. Produksi Buah-buahan dan Komoditas Hasil Kebun di Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1994

Jenis Komoditas	Luas (ha)	Produksi (ton)
Pisang	5,0	40
Pepaya	2,0	80
Jeruk	3,0	60
Mangga	0,5	2
Durian	0,5	3
Apokat	1,0	2,5
Kopi	274,0	114
Karet	18,0	8
Kelapa	26,0	7
Kulit manis	325,0	126

Sumber: Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (dicetak)

Berdasarkan data dalam Tabel 9 diketahui bahwa, tanaman kopi dan kulit manis (*Cassia vera*) merupakan komoditas yang relatif banyak diusahakan oleh masyarakat desa ini. Sebagai tanaman tahunan ataupun musiman kulit manis dan kopi dipandang banyak membantu pendapatan keluarga pada waktu musim panen.

Untuk komoditas kopi misalnya, luas tanam yang ada mencapai 274 ha atau kurang lebih 18,18% dari total luas usaha kebun kopi di Kecamatan Sangir. Sementara produksinya baru mencapai 114 ton pada tahun 1994 atau menyumbang sekitar 19% terhadap produksi kopi dalam wilayah Kecamatan tersebut. Jika ditinjau dari sisi rata-rata luas pengusahaannya, ternyata tiap rumah tangga di desa ini mempunyai kebun kopi seluas 0,57 ha. Atau setiap dua Kepala Keluarga mengerjakan sekitar 1 ha areal kebun kopi. Namun demikian, dari informasi pihak aparat pemerintahan desa tidak semua kepala keluarga atau rumah tangga yang ada di desa ini memiliki kebun kopi.

Ditinjau dari sisi teknologi penanamannya, rata-rata mereka mengemukakan tidak banyak mengalami kesulitan. Hanya saja masih membutuhkan bimbingan dan penyuluhan bagaimana cara bercocok tanam kopi ini secara lebih baik. Begitu pula dalam hal pemetikan dan penanganan pasca panen (prosesing dan sortir). Untuk saat ini sudah ada beberapa industri gilingan kopi yang berlokasi di desa-desa berdekatan diantaranya adalah, industri kopi Pak Janguik dan Pak Sati di desa Sei. Lambai. Di samping itu, juga dijumpai jasa penggilingan biji kopi

berkeliling mengendarai sepeda motor yang sengaja mendatangi para petani di pelosok-pelosok desa.

Melihat akan potensinya, bilamana usaha kebun kopi rakyat tersebut dibina dan dikembangkan ke arah pola bercocok tanam yang lebih maju serta memperkenalkan vareitas/bibit unggul kepada para petani kebun, mustahil tidak akan mungkin desa Sukoharjo menjadi penghasil utama komoditas biji kopi di masa datang.

Namun demikian, sebagaimana halnya jenis tanaman perkebunan atau tahunan ini harganya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Apalagi bilamana produksinya melimpah melebihi permintaan saat musim panen datang secara serempak sehingga harganya cenderung menurun. Dari hasil pemantauan di lapangan, saat penelitian ini dilakukan harga biji kopi yang diterima petani dari pedagang per kilogramnya berkisar antara Rp 2500,- sampai Rp 2750.-

Kemudian, untuk komoditas kulit manis (*cassiavera*) pengusahaannya mencapai seluas 325 ha dengan produksi pada tahun 1994 sebesar 126 ton. Seperti merupakan usaha tanaman kopi, komoditas kulit manis ini juga merupakan jenis tanaman primadona bagi warga desa Sukoharjo. Tidak mengherankan jika diantara mereka memandang kulit manis sebagai investasi (tabungan) dalam jangka panjang, dimana pada saat sudah bisa dipanen hasil penjualannya dapat digunakan untuk membangun rumah atau membeli barang kebutuhan rumah tangga.



Menurut informasi sekretaris desa dan beberapa kepala dusun ketika melakukan wawancara, hampir setiap rumah tangga di desa ini menanam dan mengusahakan kulit manis. Mereka berkebun pada areal lahan di hamparan dan sela-sela kaki bukit sekeliling desa bersangkutan. Merahnya pucuk daun *cassiaverra* akan terlihat di sebelah kiri dan kanan jalan raya ketika melewati desa tersebut dari arah Kabupaten Kerinci ataupun kota Padang, sebagai salah satu indikator bahwasanya tanaman bersangkutan dapat tumbuh dengan suburnya di wilayah ini. Selain itu, akan tercium aromanya yang harum saat menaiki kendaraan oplet bersama para iu dan bapak tani menuju ke pasar desa dimana mereka menjual atau melakukan transaksi dengan pedagang pengumpul. Potongan-potongan kulit kayu yang berwarna agak kemerah-merahan diikat rapi menjadi suatu ukuran tertentu mereka bawa dan diturunkan dari kendaraan, pertanda di wilayah desa ini dan sekitarnya dihasilkan komoditas kulit manis.

Dari segi kontribusinya terhadap produksi kulit manis di Kecamatan Sangir, wilayah desa Sukoharjo menyumbang sebesar 12,17% dari total produksi 1,035 ton dalam tahun 1994. Sumbangan relatifnya yang tidak begitu besar ini berkaitan dengan jumlah pohon/batang yang dapat dipanen dalam tahun tersebut, barangkali masih belum mencapai usia. Bilamana diamati pepohonan kulit manis yang ada umumnya tergolong muda antara 4 tahun sampai dengan 5 tahun, padahal usia panen minimal biasanya adalah sekitar 7 tahun ke atas.

Adapun dari segi teknis penanaman dan pemanenan pada umumnya mereka mengemukakan tiddak banyak mengalami hambatan dalam arti kata sudah mengetahui, hanya saja yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan barangkali adalah perawatan sebelum masa-masa pengambilan (produksi) dilakukan. Sungguhpun demikian, para petani perkebunan ini sangat mengharapkan akan penyuluhan dan bimbingan dalam hal pengelolaan usaha kulit manis tersebut dari pihak pertanian (tenaga penyuluhan).

Sesuai dengan sifat komoditas kulit manis ini memerlukan jangka waktu produksi yang relatif panjang dan harganya juga sangat tergantung pada permintaan pasar. Oleh karena itu menurut kalangan ahli ekonomi pertanian, jika pendekatan usaha perkebunan hendak dipakai dalam meningkatkan pendapatan atau mengentaskan kemiskinan masyarakat secara cepat diperkirakan tidak relevan. Hendaknya para petani juga memperhatikan faktor harga tersebut dan jangan tergiur hasil panen yang akan diperoleh. Jika harganya turun sebaiknya menunda dulu penebangan (panen) kulit manisnya, sehingga investasi yang dilakukan selama ini betul-betul ada manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada saat penelitian ini dilakukan, harga jual 1 kg kulit manis untuk pasar lokal (desa Sei. Lambai dan Pd. Aro) bergerak antara Rp 3200,- sampai Rp 3500,-.

### 3. Potensi dan Pola Usaha Peternakan

Usaha tani ternak oleh masyarakat di desa Sukoharjo pengusahaannya masih terbatas dalam jumlah yang relatif kecil dengan pola bersifat tradisional. Umumnya bagi meereka jenis usaha ini berfungsi sebagai penambah kesibukan bagi anggota keluarga, yang sewaktu-waktu hasilnya dapat dimanfaatkan. Jenis ternak dan perkiraan pemeliharaannya dalam tahun 1994 di desa tersebut dapat di lihat seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis dan Produksi Usaha Peternakan di Desa Sukoharjo Kec. Sangir, 1994

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Nilai (Rp)
Sapi biasa	42	21.000.000,-
Kerbau	124	73.000.000,-
Kambing	236	23.600.000,-
Ayam kampung	3400	5.100.000,-
Itik	1340	2.6800.000,-

Sumber: Monografi Desa Sukoharjo, 1994 (djolah)

Berdasarkan data dalam Tabel 10 terlihat bahwa, pemeliharaan ayam kampung merupakan jenis usaha ternak yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa bersangkutan dengan perkiraan populasi sebanyak 3400 ekor. Menurut informasi yang diterima dari Sekretaris Desa beserta sejumlah warga yang ditemui, setiap rumah tangga di desa ini memelihara ayam. Mereka memeliharanya sebagai usaha sambilan disamping pekerjaan utama, bersawah, berladang, berkebun ataupun pegawai. Selain itu, pemeliharaannya

menurut mereka tidak begitu merepotkan dan tidak mengganggu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari serta dapat dikerjakan oleh semua anggota keluarga (anak-anak). Bilamana diambil jumlah populasi yang ada maka tiap rumah rata-rata memelihara sebanyak 7 ekor ayam.

Kemudian, pemeliharaan ternak unggas lainnya yang diusahakan oleh masyarakat desa ini yaitu adalah beternak itik. Sampai dengan tahun 1994 populasi pemeliharaannya mencapai 1340 ekor dengan rata-rata pemeliharaan 2,9 ekor/KK. Jumlah ini jika dihubungkan dengan potensi dan ketersediaan lahan yang ada tergolong kecil, yaitu sekitar 3 ekor tiap rumah tangga. Jika dibandingkan dengan populasi pemeliharaan di tingkat Kecamatan Sangir, desa ini memberi kontribusi sebesar 5,72% dari jumlah total ternak itik dalam wilayah tersebut sebanyak 23,426 ekor, dengan rata-rata pemeliharaan 16 ekor/KK.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat pemeliharaan ternak itik di desa tersebut belum berkembang dan pemeliharaannya masih bersifat tradisional. Di sekitar rumah-rumah penduduk, terutama yang berdekatan dengan sawah ataupun rawa-rawa hampir tidak jumpai areal peternakan (kandang) itik tersebut. Hanya ditemukan 2 buah rumah yang teknik pemeliharaannya sudah digabung dengan usaha kolam ikan, padahal potensi sumber air sebagai persyaratan usaha ini cukup memadai. Jadi, kebanyakan warga memeliharanya bersifat sambilan dan tidak dikelola secara khusus seperti dibikinkan tambak dan kurungannya. Andaikata masyarakat dapat lebih

mengintensifkan pemeliharaannya dan dibantu lagi dengan penyuluhan serta bimbingan dalam cara beternak itik ini, bukan tidak mungkin desa Sukoharjo bakal menjadi lumbung telur itik dan sebagai pemasok (supply) bagi kebutuhan desa-desa lainnya.

Selanjutnya, untuk usaha ternak besar yang banyak dipelihara oleh masyarakat adalah jenis ternak kambing yaitu sebanyak 236 ekor. Sedangkan untuk jenis ternak kerbau populasi pemeliharaannya sebanyak 124 ekor, sementara untuk ternak sapi cuma hanya 42 ekor. Kedua jenis ternak besar yaitu kerbau dan sapi juga dipelihara untuk dapat dimanfaatkan tenaganya dalam membantu mengolah lahan sawah.

Bilamana jumlah ternak kerbau tersebut dihubungkan dengan jumlah kepala keluarga yang terdapat di Desa Sukoharjo maka diperoleh rasionya sebesar 0,26 ekor/KK. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan ternak tersebut belum merata dikalangan penduduk desa bersangkutan. Padahal dari potensi lahannya, usaha ini cukup potensial karena desanya termasuk desa persawahan dan tersedia cukup air yang merupakan persyaratan penting bagi pengembangan usaha ternak kerbau.

Dibanding terhadap populasi pemeliharaan ternak kerbau dan sapi di Kabupaten Solok dalam tahun yang sama, dimana jumlahnya mencapai masing-masing 21,576 ekor dan 41,490 ekor. Ini berarti desa bersangkutan hanya memberi kontribusi dalam pemeliharaan kerbau sebesar 0,6%

sedangkan ternak sapi sekitar 0,1% dari total populasi ternak ini di wilayah tersebut.

Relatif kecilnya populasi pemeliharaan jenis ternak besar oleh masyarakat berkaitan dengan permodalan, dimana jenis usaha ternak ini terutama kerbau dan sapi memerlukan biaya (modal) yang relatif besar. Para petani di pedesaan umumnya kesulitan dalam hal mendapatkan modal ataupun pengadaan bibit ternak tersebut.

Ditinjau dari segi teknis pemeliharaan baik ternak besar maupun ternak unggas, dari sejumlah warga yang diwawancarai umumnya menyatakan tidak mengalami kesulitan. Namun yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah mengatasi penyakit yang sering menyerang ternak ayam.

Melihat akan potensi lahan yang dimiliki oleh wilayah desa ini yang relatif sesuai bagi pengembangan beberapa jenis usaha ternak, kiranya perlu upaya peningkatan bimbingan dan kemudahan dalam berbagai bentuk bantuan terhadap petani sehingga dengan demikian niscaya usaha pemeliharaan ternak tersebut akan berkembang. Hasil dari pemeliharaannya sekaligus diharapkan dapat membantu dan menambah pendapatan rumah tangga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainal Abidin (1990) dalam kesimpulannya bahwa : Usaha peternakan bagi masyarakat atau petani di pedesaan berfungsi sebagai katup pengaman dalam ekonomi keluarga, dimana sewaktu-waktu dapat mengamankan atau menolong masalah keuangan rumah tangga, terutama saat panen gagal (paceklik).

#### 4. Produksi dan Pola Usaha Perikanan

Usaha ataupun budidaya perikanan di desa Sukoharjo masih kelihatan belum berkembang, tetapi secara kecil-kecilan sudah ada diantara warga masyarakat memanfaatkan potensi lahan yang cukup ideal bagi usaha tersebut dengan usaha kolam ikan.

Dari salah seorang petani yang mengusahakan lahan pekarangan di belakang rumahnya, mengemukakan bahwa pembuatan kolam ini baru taraf coba-coba dan mudah-mudahan katanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, luas lahan untuk usaha perikanan yang ada saat ini adalah sekitar 6 ha terdiri atas rawa-rawa dan beberapa kolam ikan walau ada diantaranya yang tidak berproduksi lagi (tidak terawat). Jika ditelusuri lebih jauh, luas lahan tersebut dapat ditingkat lagi baik dengan cara mensubstitusi lahan pekarangan maupun persawahan menjadi kolam atau tambak ikan. Disamping itu, usaha pemeliharaan atau budidaya ikan tersebut dapat pula dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi aliran sungai dan anak sungai yang cukup tersedia di wilayah desa tersebut, yaitu melalui pengembangan usaha kerambah ikan.

Ditinjau dari segi produksinya, dalam hal ini tidak diperoleh informasi atau data berapa jumlah hasil panen dari pengusahaan kolam tersebut serta tangkapan yang dilakukan oleh masyarakat di perairan umum (sungai, rawa-rawa, perigi dan sawah). Jika menggunakan data tingkat Kecamatan Sangir, maka dalam tahun 1994 produksi ikan

untuk budidaya di kolam sebesar 23,73 ton sedangkan sawah sebanyak 0,85 ton. Untuk perairan umum, produksinya yaitu sebanyak 35,11 ton hasil penangkapan di sungai dan sebesar 0,75 ton di rawa-rawa. Bilamana dikaitkan dengan jumlah petani ikanyang ada di wilayah Kecamatan tersebut, yaitu terdiri atas 184 orang untuk usaha budidaya dan 1,398 orang sebagai nelayan di perairan umum. Diperoleh rata-rata hasil usaha budidaya perikanan yaitu berupa kolam dan tambak adalah sekitar 0,13 ton/KK sedangkan untuk perairan umum, meliputi sungai dan rawa sebesar 0,026 ton/orang.

Dengan menggunakan indeks rata-rata produksi ini maka dapat diprediksi (perkiraan) produksi usaha perikanan di desa Sukoharjo, yaitu sebesar 0,39 ton untuk 3 orang Kepala Keluarga atau rumah tangga petani yang mengusahakannya. Sementara untuk usaha perairan umum dalam hal ini tidak diketahui taksiran sejumlahnya, baik segi produksi hasil maupun seberapa banyak warga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di desa bersangkutan.

Relatif rendahnya produksi usaha perikanan tersebut di antara lain disebabkan kurangnya modal di pihak petani untuk pengembangan usaha ini serta terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat baik untuk usaha kolam, tambak maupun kerambah ikan. Lagi pula tenaga teknis lapangan, khususnya masalah perikanan ini di tingkat kecamatan menurut informasi yang diterima belum tersedia. Sehingga dengan demikian sudah barang tentu



aktivitas penyuluhan tersebut masih banyak hambatan penyelenggaraannya.

### C. Identifikasi Faktor Penyebab Ketertinggalan Desa Sukoharjo

Faktor penyebab ketertinggalan ini akan berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lainnya serta antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Akan tetapi secara umum gambaran nyata penyebabnya terefleksi dalam bentuk pendapatan mayoritas penduduk yang masih rendah, kurangnya pengembangan sumberdaya alam, kondisi sumberdaya manusia yang relatif belum berkembang, keterasingan dan keterisolasian dari sumber-sumber kemajuan serta adanya struktur masyarakat yang menghambat.

Untuk mengetahui secara langsung tentang beberapa permasalahan yang dihadapi dan dirasakan oleh warga masyarakat tentang kebutuhan pembangunan desa secara keseluruhan dalam arti luas maupun kepentingan masing-masing rumah tangga mereka, dalam hal ini dilakukan wawancara terbuka terhadap sejumlah masyarakat beserta aparat pemerintahan desa bersangkutan. Melalui teknik semacam ini, mereka dikumpulkan dalam suatu ruangan (SD. No.1 Sukoharjo) dan kemudian secara bebas serta terbuka disuruh mengemukakan pendapatnya sekaligus menuliskan pada selembar kertas tentang berbagai pembangunan yang diperlukan, persoalan yang dihadapi dan kekurangan-kekurang yang ada sesuai menurut aspirasi mereka sendiri.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP FADANG

Dari hasil pertemuan dengan beberapa anggota masyarakat diperoleh gambaran keadaan ataupun permasalahan yang dihadapi saat ini sekaligus juga merupakan bidang pembangunan yang dibutuhkan, seperti terlihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Refleksi Permasalahan yang Dihadapi Menurut Warga Desa Sukoharjo Kecamatan Sangir, 1995

Bidang Permasalahan	Jenis Masalah yang Dihadapi
1. Bidang Pertanian dan Perikanan	1.1. Untuk pembasmi hama tanaman 1.2. Kami memerlukan irigasi di dusun Sapan karena lahannya untuk dijadikan sawah masih lebar. 1.3. masalah kami di desa mengenai pertanian adalah mengharapkan agar penyuluh pertanian agar dapat aktif untuk datang penyuluhan setiap waktunya/tinggal di desa kami supaya lebih banyak minta petunjuk 1.4. Kami butuh penyuluh pertanian (kebun) 1.5. Tanaman padi ada yang tidak menghasilkan 1.6. Rendahnya hasil pertanian kami disebabkan tidak ada bimbingan dari PPL. 1.7. Butuh penyuluhan hama babi 1.8. Harga pupuk terlalu mahal sedang hasil jauh lebih rendah, pemasaran hasil murah 1.9. Tanaman cabe, musim penghujan tidak berhasil, buah yang muda banyak jatuh, umurnya pendek. Bagaimana cara mengatasinya
2. Bidang Peternakan dan Perikanan	2.1. Bagaimana cara membasmi penyakit ayam 2.1. Bagaimana cara beternak burung puyuh 2.3. Kami ingin mendapatkan mesin tetas telur ayam

Bidang Permasalahan	Jenis Masalah yang Dihadapi
3. Bidang Pendidikan dan Agama	<p>2.4. Bagaimana cara memelihara dan merencanakan kolam ikan yang baik</p> <p>2.5. Kami ingin mendapatkan bantuan ternak kerbau dan sapi</p> <p>3.1. Kami butuh pendidikan SLTA</p> <p>3.2. Bagaimana cara meminta tambahan guru melalui desa</p> <p>3.3. Kami membutuhkan guru agama supaya agama jangan sampai kabur di desa kami Sukoharjo</p> <p>3.4. Pendirian mushalla satu buah, karena kekurangan tempat pengajian anak-anak di tempat di dusun Bumi Ayu</p> <p>3.5. Kami kurang jelas masalah pendidikan yang mana tidak dipungut biaya SPP sedangkan anak saya bersekolah di SMP masih membayar iuran SPP setiap bulannya yaitu SMP Yayasan Bina Insani</p> <p>3.6. Materi penyuluhan agar disesuaikan dengan keadaan masyarakat</p>
4. Bidang Transportasi dan Peningkatan	<p>4.1. Butuh sekali perbaikan jalan atau pengaspalan</p> <p>4.2. Mengenai sarana perhubungan mohon pemecahannya agar cepat bisa dibangun jalan</p> <p>4.3. Polongan jalan di Bumi Ayu rusak</p> <p>4.4. Kami butuh jalan yang mulus</p> <p>4.5. Jalan desa menuju dusun Pasir Putih banyak yang rusak dan berlumpur panjang 4 km kami ingin supaya diperbaiki</p> <p>4.6. Mohon perbaikan jalan desa Sukoharjo</p> <p>4.7. Kami sebagai kepala dusun sumberjo mohon agar jalan kami dari sumberjo ditembuskan sampai Desa Liki</p>

Bidang Permasalahan	Jenis Masalah yang Dihadapi
	<p>4.8. Kami masyarakat desa Sukoharjo yang paling dirasakan yaitu mengenai penerangan listrik</p> <p>4.9. Kami butuh penerangan PLN, bisakah dimasukkan PLN</p> <p>4.10 Sektor penerangan, mengingat kepentingan masyarakat selama ini didambakan penerangan listrik masuk desa</p> <p>4.11 Ditempat kita di desa Sukoharjo masalahnya mengenai listrik itu yang menjadi masalah dengan masyarakat, sedangkan mengenai listrik sudah seringkali di survey tapi tidak ada buktinya.</p> <p>4.12 Mendambakan penerangan listrik ke desa, butuh sekali pemasukan lampu</p>
5. Bidang Kesehatan Kesenian dan Keamanan	<p>5.1. Kami ingin mendapatkan penyuluhan bidang kesehatan</p> <p>5.2. Masalah kami pengaktifan kesenian kuda kepang</p> <p>5.3. Kami ingin pembenahan masalah grup band</p> <p>5.4. Kami dari dusun Sapan akan mengadakan kesenian, bagian karang taruna berniat mencari jalan mendapatkan alat-alat dan pakaian pertunjukkan</p> <p>5.5. Masalah cara menggiatkan keamanan desa kami di Sukoharjo</p>
6. Bidang Pemerintahan dan Administrasi	<p>6.1. Kami ingin pemimpin yang betul mau memimpin</p> <p>6.2. Kami ingin peraturan dan undang-undang di desa</p> <p>6.3. Peraturan tidak aktif</p> <p>6.4. Butuh buku petunjuk kerja untuk LKMD tiap seksi</p> <p>6.5. Sertifikat prona tidak lancar</p>

Dengan mempelajari beberapa refleksi permasalahan yang dikemukakan warga masyarakat tersebut serta dibarengi dengan hasil analisis terhadap potensi dan karakteristik desa bersangkutan maka dapat diidentifikasi faktor penyebab ketertinggalan yang dialami dan dihadapi wilayah tersebut.

Beberapa temuan faktor penyebab ketertinggalan dan kendala-kendala yang dapat menghambat pembangunan desa ini yaitu antara lain adalah:

1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, meliputi dan menyangkut perihal:
  - a. Relatif masih rendahnya tingkat produktivitas lahan/ usaha tani padi sawah, yaitu hanya mencapai 3,57 ton tiap hentarnya. Hal ini diantara lain disebabkan karena pengaruh adopsi teknologi pertanian, baik segi penggunaan faktor input maupun pola usaha yang dilakukan belum seperti daerah pertanian lainnya yang lebih maju.
  - b. Rendahnya tingkat produksi dari beberapa jenis komoditas tanaman pangan seperti, jagung, kedele, kacang tanah dan beberapa jenis sayuran. Keadaan ini terutama sekali disebabkan masih relatif kecilnya luas tanam yang diusahakan oleh masyarakat. Selain itu juga berkaitan dengan pola pemanfaatan lahan oleh para petani yang belum lagi mengenai dan melakukan sistem pergiliran tanaman serta pemakaian bibit/vareitas unggul.

- c. Kondisi pengairan atau irigasi yang belum lagi memadai, baik dari segi penyediaan jumlah air maupun dalam hal pengaturan (manajemen) penggunaan air yang belum efisien. Artinya, masih terdapat sumber potensi air yang dapat dijadikan sebagai pemasok (supply) sistem air irigasi serta cukup banyaknya saluran/jaringan air yang harus segera diperbaiki.
- d. Kurang atau rendahnya frekuensi/intensitas bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada para petani sehingga dalam beberapa aspek tertentu di bidang pertanian ini tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki masih rendah dibandingkan dengan petani-petani daerah lainnya yang sudah maju. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan tenaga PPL yang ada dalam wilayah bersangkutan serta jauhnya jangkauan wilayah operasi yang harus dijalaninya.
- e. Belum lengkapnya kelembagaan pertanian di desa bersangkutan baik secara kuantitas maupun kualitas, yang sangat pentingnya dalam menunjang keberhasilan setiap program yang dijalankan. Hal ini dapat diketahui dari ketiadaan (belum terbentuknya) bentuk organisasi di tingkat petani, apakah dalam bentuk hubungan kerja (kelompok tani) ataupun pemasaran hasil pertanian.

2. Bidang Pertanian Tanaman Perkebunan, mencakup masalah:

- a. Rendahnya produksi buah-buahan dari beberapa jenis tanaman perkebunan masyarakat seperti, kelapa, jeruk, alpokat dan durian. Ini antara lain disebabkan karena belum begitu banyaknya areal tanam atau jumlah batang yang diusahakan serta masih kurangnya orientasi usaha mereka ke arah pembudidayaannya tanaman tersebut selama ini.
- b. Belum adanya tenaga dan sarana penyuluhan di tingkat desa, sehingga terbatas dan kurangnya bimbingan dan petunjuk yang diterima para petani dalam hal pengusahaan dan teknologi pengolahan hasil perkebunan mereka.
- c. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran komoditas hasil tanaman perkebunan masyarakat dan seringnya mengalami harga yang tidak menentu (fluktuasi). Kondisi ini antara lain disebabkan karena sistem mata rantai perdagangan komoditas itu sendiri dan lagi pula di tingkat desa belum ada wadah ekonomi masyarakat yang dapat menampung dan menyalurkan hasil produksi perkebunan mereka, sehingga tingkat pemasarannya hanya mencapai pedagang pengumpul di pasar desa.
- d. Penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman serta pengadaan pupuk dan racun tanaman, termasuk gangguan dari babi hutan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

**3. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan, masih dihadapkan pada persoalan:**

- a. Kecilnya populasi pemeliharaan beberapa jenis ternak seperti, kerbau, sapi dan kambing. Hal ini disebabkan faktor terbatasnya modal dipihak petani sehingga mereka merasa kesulitan dalam mendapatkan bibit.
- b. Belum berkembangnya usaha pemeliharaan ternak unggas khususnya beternak itik, padahal dari segi ketersediaan dan kondisi lahan cukup potensial untuk pengembangan usaha ini. Faktor tersebut berkaitan dengan kurangnya bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada para petani.
- c. Masih terbatas dan belum berkembangnya usaha pemeliharaan ikan, baik dalam bentuk budidaya kolam maupun kerambah sungai. Kondisi dan kenyataan ini tidak terlepas dari faktor permodalan dan pengetahuan petani yang masih perlu ditingkatkan. Ditambah lagi, dengan tertutupnya atau ketidaktahuan peluang pemasaran sehingga minat dan orientasi mereka terhadap usaha ini masih kurang.
- d. Belum tersedianya tenaga penyuluhan baik di tingkat desa maupun kecamatan.



**4. Bidang Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Air, Pekarangan dan Kesehatan, terdiri atas beberapa permasalahan:**

- a. Pengadaan dan penyediaan sarana air bersih untuk konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan masyarakat yang tergolong masih rendah terhadap kesehatan dan kebersihan dimana selama ini umumnya mereka tergantung pada konsumsi air sungai, bandar atau sawah yang sudah tersedia.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber air oleh masyarakat bagi tujuan pengembangan usaha yang bersifat produktif dalam artian manfaat ekonomi untuk penunjang kegiatan lainnya, terutama perikanan dan peternakan. Di samping itu juga, penyediaan dalam mendapatkan kebutuhan energi alternatif berskala mikro (pembangkit tenaga air).
- c. Kurang efektifnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan pekarangan; dimana pada beberapa bagian tempat dalam areal/kawasan pemukiman rumah penduduk masih dijumpai lahan yang tidak produktif.

**5. Bidang Potensi Sumberdaya Manusia dan Pendidikan, masih mengalami beberapa masalah dan hambatan;**

- a. Rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat baik laki-laki maupun wanita (ibu rumah tangga) yaitu rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar, bahkan di antaranya cukup banyak yang buta huruf (tidak sekolah).

- b. Cukup banyaknya jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang putus atau tidak melanjutkan sekolahnya pada setiap jenjang pendidikan. Sekaligus hal ini menunjukkan Tingkat Partisipasi Pendidikan yang masih rendah untuk masing-masing jenjang/usia sekolah, meliputi pendidikan SD, SLTP dan SLTA.
- c. Persepsi sebagian besar masyarakat (orang tua) terhadap pentingnya arti pendidikan bagi anak-anak mereka tergolong masih rendah. faktor ini sebenarnya tak terlepas dari latar belakang pendidikan dan pengetahuan serta ekonomi keluarga (orang tua) itu sendiri.
- d. Cukup banyak warga masyarakat, termasuk di dalamnya anak-anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan serta kaum wanita/ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh harian di perusahaan perkebunan. Sebagian besar waktunya seharian tersita habis untuk bekerja di tempat tersebut sehingga tidak dapat memikirkan dan melakukan berbagai kesempatan (peluang) yang bersifat lebih produktif ataupun berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- e. Masih terdapatnya kekurangan tenaga guru Sekolah Dasar yang ditempatkan atau bertugas di wilayah desa tersebut, sehingga guru-guru yang ada pada saat ini harus mengajar dengan kelas rangkap

(ganda). Dengan arti lain, ada kelas yang tidak memiliki guru atau Kepala Sekolah harus mengajar di samping menjalani tugas-tugas rutin.

- f. Masih adanya hambatan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program belajar model Paket A dan B yang sudah diluncurkan oleh pemerintah selama ini, yaitu pada masalah sulitnya mendapatkan ataupun mengumpulkan warga belajar.

**6. Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Pedesaan, terdapat beberapa tantangan dan persoalan yaitu;**

- a. Belum adanya tokoh masyarakat yang betul-betul dapat memberikan contoh dan tauladan serta menyatukan berbagai kekuatan dan potensi nilai nilai budaya yang dimiliki, sehingga cenderung sistem kemasyarakatannya bersifat individualitas
- b. Belum terbentuk dan berkembangnya jenis-jenis organisasi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dipandang sangat penting artinya di dalam menumbuhkan semangat membangun dan kebersamaan di kalangan warga desa.
- c. Sementara organisasi atau kelembagaan pembangunan yang ada saat ini yaitu LKMD, masih dihadapkan pada kualitas sumberdaya manusia di setiap seksi-seksi dalam wadah tersebut. Demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, perlu pula peningkatan aktivitas dan mutu pelayanan terhadap

masyarakat serta masalah figur atau tokoh/pemimpin dari kelembagaan tersebut yang dapat membaca aspirasi warga. Dalam kaitan dengan masalah ini, dipandang masih relatif rendahnya tingkat dinamika kelompok dari anggota kelembagaan pembangunan dan pemerintahan, yang di antara lain disebabkan oleh kualitas dari faktor-faktor dinamika dan karakteristik anggota yang ada di dalam kelembagaan tersebut.

- d. Tidak jalannya beberapa aktivitas seni budaya yang ada di tengah-tengah kehidupan warga desa serta kegiatan sistem keamanan kampung (siskamling) dan masalah sosial lainnya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa seksi-seksi yang ada dalam LKMD belum berfungsi sebagaimana mestinya. Di samping itu, juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran (sikap) masyarakat terhadap masalah, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.
- e. Masih belum tercerminnya sikap untuk menauladani semangat membangun dari para pendiri desa ini seperti yang tertuang ke dalam nama desa yang mereka berikan, terutama pada generasi muda dimana mereka lebih senang bekerja sebagai buruh harian perkebunan ketimbang berusaha dan membuka lahan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

7. Bidang Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat dan Infrastruktur Pedesaan, hambatan dan masalahnya yaitu:

- a. Kondisi prasarana jalan desa, yaitu yang menghubungkan desa tersebut dengan jalan utama ataupun desa lainnya sukar dilewati kendaraan karena permukaan jalan yang hancur/rusak dan berlumpur.
- b. Belum tersedianya sarana penerangan berupa listrik pedesaan dari pihak PLN. Keberadaan atau kehadiran prasarana ini pada hakekatnya sangat penting artinya bagi masyarakat, namun tidak akan terlepas dengan keadaan ekonomi dan bentuk-bentuk kegiatan produksi yang berkembang di wilayah bersangkutan.
- c. Tidak terdapatnya kios-kios atau depot tempat penjualan dan pengadaan alat/bahan keperluan pertanian ataupun sarana produksi (saprodi) di wilayah desa tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi letak geografis dan topografis wilayah, desa Sukoharjo memiliki potensi alam yang menjanjikan serta mendukung bagi pembangunan dan pengembangan desa tersebut. Kondisi fisik wilayah dan potensi sumberdaya lahannya cukup ideal untuk berbagai usaha pertanian, terutama persawahan, perkebunan tanaman kopi dan kulit manis, kolam ikan dan kerambah serta usaha ternak karbau dan itik.
2. Jumlah penduduk desa Sukoharjo dalam tahun 1994 tercatat sebanyak 2425 jiwa, dengan komposisi menurut jenis kelamin relatif berimbang yaitu sebanyak 1192 jiwa penduduk laki-laki sementara penduduk wanitanya berjumlah 1233 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk memiliki indeks sebesar 63 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan tingkat kedataan agrarisnya 0,44 orang/ha. Sebagian besar (61%) dari mereka hidup sebagai petani sawah dan perkebunan serta bekerja sebagai buruh tani/kebun di perusahaan perkebunan sekitar 31%.
3. Dari aspek sejarah dan asal usulnya, penduduk desa ini asal mulanya adalah terdiri atas orang-orang Jawa yang didatangkan dan dipekerjakan di perusahaan perkebunan

pada masa penjajahan oleh Pemerintah Belanda. Beberapa diantaranya kemudian membuka wilayah (lahan) desa tersebut dan bermukim disitu sehingga terus berkembang seperti keadaan sekarang. Komposisi penduduknya saat ini sudah meliputi sebanyak 35% suku Jawa dan sekitar 65% lagi suku Minangkabau yang datang kemudiannya dari berbagai daerah di Sumatera Barat guna mencari nafkah kehidupan di sana.

4. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah berupa komunitas petani dan pekebun dengan nilai-nilai sosial budaya mereka bersumber pada dua kutub yaitu, kebudayaan Jawa dan Minangkabau. Latar belakang unsur budaya yang demikian pada hakekatnya akan melahirkan potensi yang beragam, sehingga perpaduannya dengan aneka potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa ini bilamana dapat dikembangkan maka sesuai menurut teori keunggulan komparatif (law of comparative advantage) justru melahirkan keragaman yang lebih baik, dalam artian akan mampu berperan positif terhadap perekonomian atau pembangunan desa bersangkutan.
5. Dari segi kemampuan produksi, wilayah desa Sukoharjo memiliki potensi di bidang usaha tani padi sawah dengan areal persawahan seluas 573 ha dan masih mungkin untuk ditingkatkan baik dari sisi ketersediaan sumberdaya lahan maupun kemampuan sumberdaya air untuk sistem pengairannya. Dengan kondisi persawahan yang ada saat ini, produksi padi yang dihasilkan desa

tersebut telah memberikan kontribusi sekitar 8,4% terhadap total produksi padi di wilayah Kecamatan Sangir. Disamping itu, wilayah desa ini juga tak kalah potensialnya sebagai penghasil komoditas perkebunan, terutama tanaman kopi dan kulit manis. Produksi kopi dalam tahun 1994 menyumbang kurang lebih 19% dari total produksi di wilayah Kecamatan tersebut. Sementara untuk tanaman kulit manis tingkat produksinya dalam tahun 1994 mencapai ton dan menyumbang sekitar 12% dari jumlah produksi dihasilkan oleh wilayah Kecamatan Sangir.

6. Dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan produksi, di wilayah desa ini sudah dijumpai beberapa peralatan seperti, mesin huller (rice milling unit), mesin pemisah gabah (windower) dan alat perlengkapan untuk mengolah lahan terutama berupa bajak dengan tenaga binatang. Pemakaian sarana tersebut dikalangan petani disamping dapat membantu dan berperan di dalam proses produksi (pekerjaan) kehadirannya juga merupakan cerminan dari sebahagian bentuk dan taraf teknologi pertanian yang ada di desa bersangkutan.
7. Ditelusuri dan dipelajari dari berbagai potensi sumberdaya wilayah ataupun segi aktivitas ekonomi masyarakat desa tersebut masih dihadapan pada sejumlah permasalahan atau kendala-kendala pembangunan, yang sekaligus dipandang sebagai faktor penyebab ketertinggalannya selama ini. Faktor-faktor penyebab



yang dimaksud antara lain yaitu:

- a. Dalam bidang usaha pertanian padi sawah masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat produktivitas, sistem dan pola usaha ataupun adopsi teknologi yang perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang belum sempurna dan memadai serta penyediaan tenaga dan keterbatasan penyuluhan.
- b. Dalam bidang usaha perkebunan masih relatif rendahnya tingkat produksi, luas atau areal tanam dan pengusaha yang terbatas, penyediaan dan penggunaan bibit/varietas unggul yang masih perlu digalakkan terutama untuk jenis tanaman pekarangan dan tegalan serta permasalahan terbatasnya pemasaran komoditas.
- c. Untuk usaha bidang peternakan kendala utamanya adalah kurangnya modal untuk pengadaan bibit khususnya ternak besar, masih rendahnya populasi pemeliharaan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani terutama dalam beternak itik serta kurangnya penyuluhan dan tenaga pendamping/pembimbing di lapangan.
- d. Di bidang usaha perikanan dihadapkan pada persoalan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan cara pengusaha dan pemeliharaan, kekurangan modal di pihak petani serta belum tampaknya peluang pemasaran. Padahal dari sisi potensi lahan dan

sumberdaya air cukup tersedia, apalagi jika pengembangannya dilakukan secara terpadu dengan usaha ternak itik.

- e. Dalam bidang prasarana perhubungan atau transportasi masih mengalami hambatan disebabkan karena kondisi jalan desa yang cukup jelek atau rusak sehingga sukar dilalui kendaraan. Selain itu juga dijumpai beberapa jalan antar dusun yang rusak atau kurang terawat.
- f. Dari segi aspek sumberdaya manusia dan pendidikan, dihadapkan pada masalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, tingkat partisipasi pendidikan yang relatif rendah, kekurangan tenaga guru di tingkat sekolah dasar, buta huruf di kalangan masyarakat, hambatan dalam proses pembelajaran masyarakat (penyediaan waktu dan kesempatan).
- g. Menyangkut aspek kelembagaan pedesaan, pada umumnya belum berkembang baik segi kuantitas maupun kualitas. Hampir tidak dijumpai bentuk-bentuk kelembagaan dan kelompok-kelompok hubungan kerja di desa ini selain dari LKMD dan wadah pemerintahan desa.
- h. Dari aspek sosial budaya masyarakat, masih dihadapkan pada masalah semangat kebersamaan dan swadaya membangun, sikap dan kesadaran terhadap

kesehatan, keberhasilan serta lingkungan yang perlu ditingkatkan (dibudayakan).

## **B. Implikasi Kebijakan**

### **1. Alternatif Program Penanggulangan Ketertinggalan Desa Sukoharjo**

Dengan mempelajari beberapa faktor penyebab ketertinggalan dan kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan desa Sukoharjo seperti yang telah diidentifikasi di atas dapat diajukan atau ditawarkan beberapa alternatif Program penanggulangannya, antara lain yaitu :

#### **a. Program peningkatan Usaha Tani dan Perkebunan, dengan paket-paket sebagai berikut:**

##### **1). Peningkatan produksi hasil atau produktivitas usaha tani padi sawah meliputi prihal:**

a). Perbaikan sistim dan pola usaha tani, mencakup hal pengelolaan dan pengolahan lahan, pemakaian bibit/parietas unggul, dan pengendalian hama tanaman.

b). Penerapan pola intensivikasi usaha tani padi sawah malalui paket, Inmum, insus dan supra insus.

c). Perbaikan dan perluasan teknologi pasca panen (penanganan gabah) dikalangan petani.

d). Peningkatan sistem pengelolaan pengairan, meliputi pembenahan saluran, bandar dan distribusi air irigasi.

- e). Penambahan atau perluasan lahan sawah baru dan sarana irigasi yang masih mungkin dilakukan ditinjau dari ketersediaan dan potensinya.
- 2). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Petani, meliputi perihal:
- a). Penyebarluasan informasi melalui peningkatan Intensitas penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kepada petani.
  - b). Menempatkan tenaga penyuluhan lapangan (PPL) di wilayah desa bersangkutan dan sekaligus memberi petunjuk, melatih serta mencontohkan atau mendemonstrasikan kepada petani tentang ide dan teknik yang berkaitan dengan masalah pertanian.
  - c). Mengirim dan mengikutsertakan ataupun mengajak beberapa warga petani untuk melihat, mempelajari dan membandingkan perihal pertanian di daerah lain yang dipandang lebih maju.
- 3). Peningkatan hasil usaha tani dilahan kering (tegalan dan pekarangan), meliputi perihal:
- a). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan dan tegalan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan.
  - b). Menggiatkan usaha diversifikasi tanaman dan sekaligus perbaikan terhadap pola tanam dan pengelolaan lahan termasuk pergiliran tanaman,

penggunaan pupuk dan pemakaian bibit unggul.

c). Meningkatkan usaha lahan tegalan dan pekarangan yang selama ini ditelantarkan tidak ditanami dengan tanaman produktif dan jika memungkinkan dialihpungsikan dari lahan pertanian menjadi lahan kolam/perikanan.

4). Peningkatan hasil atau produktivitas usaha perkebunan, meliputi kegiatan :

a). Memotivasi para petani untuk lebih meningkatkan areal usaha dan jumlah batang tanaman perkebunannya dengan jenis komoditas atau tanaman produksi (Industri).

b). Melengkapi tenaga dan sarana penyuluhan bidang usaha perkebunan baik di tingkat Kecamatan maupun desa bersangkutan. Sekaligus juga meningkatkan frekuensi bimbingan dan pembinaan dalam usaha perkebunan, khususnya budidaya tanaman kopi, kulit manis dan kelapa.

c). Peningkatan teknologi penguasahaan, pemeliharaan dan pemrosesan (sortasi dan pengolahan) hasil tanaman perkebunan.

b. Program peningkatan hasil dan hasil usaha peternakan, dengan paket-paket kegiatan sebagai berikut:

1). Upaya peningkatan jumlah pengusaha atau populasi pemeliharaan ternak, mencakup perihal:

a). Pemberian bantuan bibit ataupun penyediaan kredit dan pinjaman modal para petani.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

- b). Peningkatan teknik-teknik pemeliharaan ternak dan upaya penanggulangan penyakit hewan ternak.
  - c). Mengajak kelompok masyarakat yang memiliki modal untuk mau membantu atau menanam Investasi di bidang usaha ini, khususnya ternak sapi, kerbau dan kambing dengan suatu sistem kelembagaan bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik dan pemelihara.
- 2). Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan petani ternak, meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a). Menempatkan tenaga bidang peternakan di wilayah desa tersebut, guna dapat mengarahkan dan membimbing warga dalam usaha pemeliharaan ternak.
  - b). Menyediakan buku-buku petunjuk tentang peternakan di balai desa.
  - c). Memotivasi para petani dalam mengembangkan usaha peternakan dan sekaligus membentuk kelompok-kelompok peternak.
  - d). Merencanakan dan membuat contoh usaha pemeliharaan ternak unggas, terutama ternak itik.
- c. Program peningkatan produksi dan Usaha perikanan, dengan paket-paket kegiatan sebagai berikut:
- 1). Peningkatan produksi usaha budidaya perikanan, meliputi perihal:
    - a). Pengembangan dan perluasan budidaya perikanan melalui kolam atau tambak.

- b). Pengembangan usaha pemeliharaan ikan melalui kerambah pada alur dan anak-anak sungai.
  - c). Penyediaan bantuan modal atau kredit usaha perikanan bagi para petani.
- 2). Pembinaan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam usaha bidang perikanan, mencakup prihal:
- a). Memperkenalkan cara-cara pemeliharaan ikan melalui kolam, tambak dan kerambah sekaligus teknik pembuatannya.
  - b). Mengirim dan mengikutsertakan beberapa warga sebagai kader perikanan desa, untuk mempelajari cara-cara pemeliharaan (budidaya) Ikan serta teknologi pembibitannya ke daerah yang dipandang lebih maju dalam usaha tersebut.
  - c). Memberikan informasi tentang prospek dan peluang bisnis usaha perikanan.
  - d). Penyuluhan tentang pengolahan/pengawetan komoditas perikanan.
- d. Program pemanfaatan potensi Sumber daya air, dengan paket kegiatan sebagai berikut:
- 1). Pengadaan sumber air bersih untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, mencakup prihal:
    - a). pembangunan fasilitas air bersih dan sekaligus penyalurannya dari sumber mata air/sungai ke rumah penduduk atau ketempat penampungan umum.

- b). membuat percontohan penggunaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga melalui sumur galian bagi lokasi pemukiman warga yang memungkinkan.
- 2). Pengoptimalan pemanfaatan potensi air bagi berbagai keperluan produksi, yaitu mencakup:
- a). Meningkatkan efisiensi penyaluran/tata air irigasi, mencakup perbaikan saluran dan distribusi.
  - b). Penggunaan sumber-sumber air bagi upaya pengembangan usaha perikanan dan peternakan.
  - c). Pengembangan sumberdaya air untuk penyediaan kebutuhan energi listrik pedesaan (kincir air), yaitu meliputi perbaikan terhadap sistem pembangkit yang telah ada atau merencanakan dan memasang unit pembangkit yang baru.
  - d). Membangun dan meningkatkan kapasitas pengairan untuk persawahan.
- e. Program peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia, dengan paket-paket kegiatan sebagai berikut:
- 1). Peningkatan pengetahuan dan pendidikan Masyarakat, meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a). Mengaktifkan paket-paket program pendidikan Masyarakat yang telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, seperti kelompok belajar (kejar) paket A dan B ataupun kelompok belajar usaha (KBU).



- b). Merencanakan dan membuka sejenis Sekolah-Sekolah terbuka pada wilayah pedesaan, khususnya di wilayah desa binaan dan sekitarnya sehingga siswa-siswa yang tidak melanjutkan/putus sekolah dapat memperoleh kembali kesempatan belajarnya. Di samping tetap dapat bekerja mereka juga bisa membantu orang tua bekerja. Sedapat mungkin menjadikan wilayah desa binaan ini sebagai Laboratorium Pendidikan dan pengajaran bagi jurusan PLS dan sekaligus sebagai tempat penelitian bagi pakar-pakar Pendidikan di IKIP Padang dalam merealisasikan ide serta pemikirannya.
- 2). Peningkatan keterampilan dan kesehatan Masyarakat, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- a). Meningkatkan intensitas Program-program pengabdian bagi Masyarakat baik dari pihak perguruan Tinggi ataupun Dinas/Instansi lainnya, dalam berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan.
- b). Mengegerakan dan mengarahkan Program-program PKK desa pada kegiatan pelayanan kesehatan dan upaya perbaikan gizi melalui kerjasama Bidan desa serta pihak Puskesmas di Kecamatan. Dalam hal ini sangat perlu direalisasikan semacam kegiatan pemeriksaan kesehatan anak-anak sekolah dan memberikan makanan sehat dan bergizi secara terjadwal kepada mereka.

f. Program peningkatan bidang sosial budaya dan kelembagaan pedesaan, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pengorganisasian dan pembinaan Masyarakat, yaitu meliputi perihal:
  - a). Menjaring tata nilai budaya dan sistem masyarakat yang ada atau berkebang di tengah-tengah Masyarakat setempat, kemudian memberi penyuluhan dan pembinaan dalam rangka mengubah keadaan dari suasana konflik ke suasana kebersamaan.
  - b). Penumbuhan peran berbagai unsur di dalam Masyarakat menjadi kelompok swadaya dan usaha bersama, untuk membangun dengan semangat "rajin, swadaya dan bersama".
  - c). Memperbaiki dan mengaktifkan kelembagaan pedesaan yang ada (LKMD dan Pemerintahan) yaitu meliputi peningkatan kualitas faktor-faktor dinamika kelompok pada kelembagaan tersebut, seperti: struktur kelompok, kekompakan, suasana dan sebagainya.
  - d). Motivasi Masyarakat dalam hal pembentukan kelembagaan sosial ekonomi ataupun kelompok hubungan kerja mencakup bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan sebagainya : seperti, kelompok tani, kelompok pekebun, peternak, koperasi.

- 2). Peningkatan sikap dan kesadaran Masyarakat terhadap bidang kesehatan, kebersihan dan Lingkungan yaitu:
  - a). Mengadakan atau memberi penyuluhan tentang masalah kesehatan, kebersihan dan pelestarian lingkungan.
  - b). Memperlihatkan secara langsung kepada Masyarakat tentang kondisi rumah tinggal yang ideal, yaitu dapat memenuhi persyaratan kesehatan.
  
- g. Program peningkatan Intrastruktur pedesaan dan fasilitas penunjang kegiatan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1). Peningkatan prasarana jalan desa (transportasi) meliputi perihal:
    - a). Memperbaiki dan mengeraskan permukaan jalan desa termasuk perbaikan bandar/saluran dan polongan air.
    - b). Membangun dan memperbaiki jalan antar desa dan dusun.
  
  - 2). Pengadaan fasilitas penunjang produksi dan pengolahan, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - a). Penyediaan mesin-mesin atau peralatan seperti mesin perontok gabah, giling kopi, dan sebagainya.
    - b). Pengadaan tempat-tempat penjualan sarana produksi, termasuk pupuk dan racun hama tanaman.
    - c). Pemberian bantuan kredit kepada petani di dalam meningkatkan usahanya, khususnya untuk mendapatkan dan melengkapi sarana produksi.

## 2. Rekomendasi

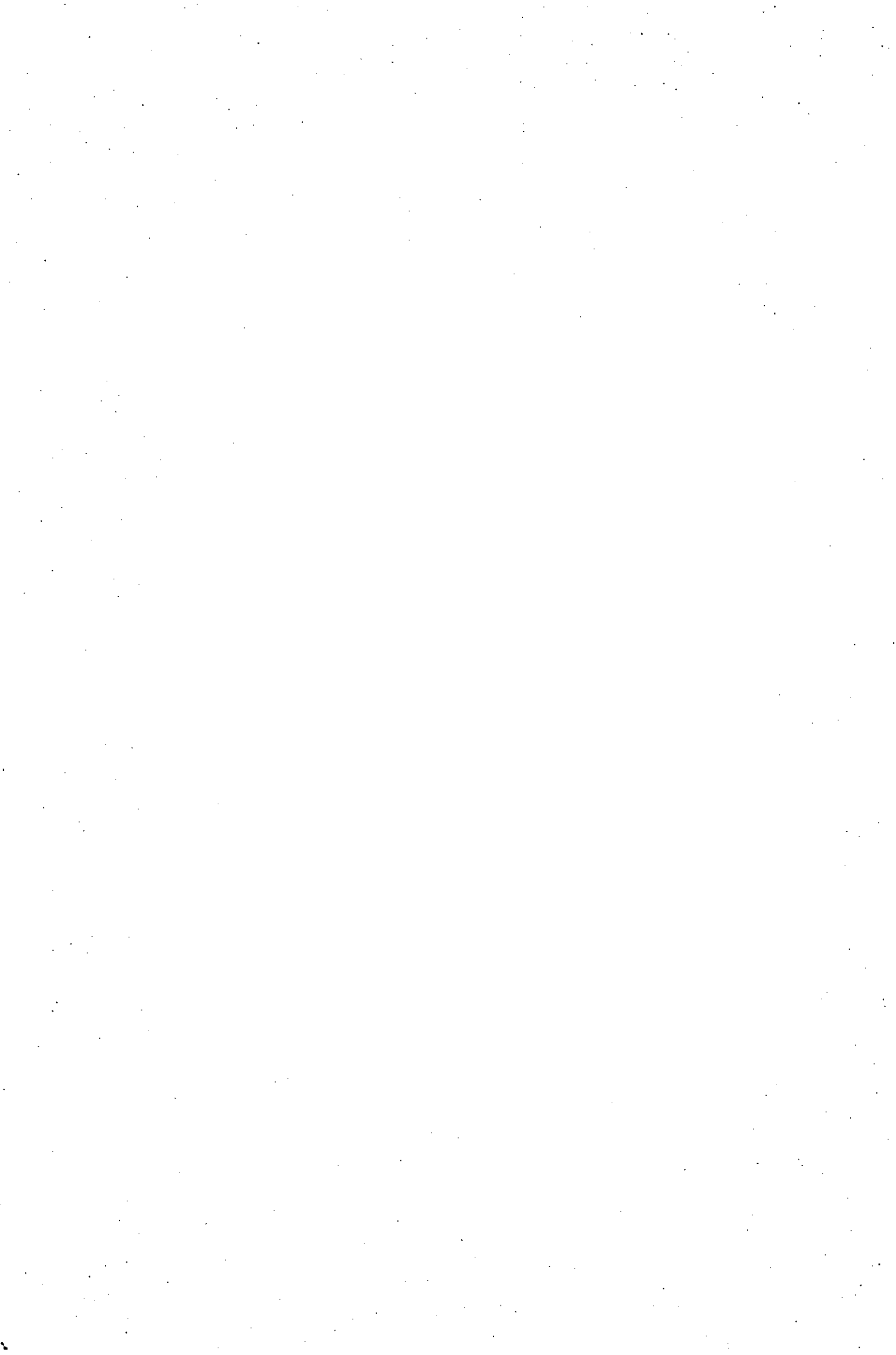
Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini dapat diajukan sejumlah rekomendasi untuk disarankan di dalam menentukan pilihan kebijakan dan arah pengembangan desa bersangkutan di masa datang, antara lain yaitu:

1. Untuk lebih memperlancar dan mempercepat gerak pembangunan desa tertinggal, khususnya kasus desa Sukoharjo ini perlu kiranya peningkatan koordinasi diantara Dinas dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pedesaan yang ikut terlihat langsung dalam menangani program-program atau pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah bersangkutan.
2. Dalam menerapkan setiap rencana pengembangan dan kegiatan pembinaan untuk berbagai bidang yang ditawarkan kepada masyarakat, hendaklah dilakukan studi peninjauan serta penelitian yang lebih terfokus dan mendalam terhadap permasalahan yang akan ditangani dan kelompok sasar sebagai penerima dan pelaku kegiatan itu sendiri. Pilihan kebijakan pengembangan disamping menyentuh langsung sisi kehidupan mereka juga memperhatikan akan manfaat dan nilai tambah dengan tidak mengabaikan (berdasar) pada sisi potensi pembangunan dan keunggulan komparatif yang dimiliki wilayah bersangkutan.
3. Kebijakan dalam hal melengkapi prasarana dan sarana penyuluhan, terutama menempati petugas atau tenaga

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
JKIP PADANG

penyuluhan dan pendamping di lapangan adalah sangat penting diprioritaskan guna dapat membimbing dan mendampingi masyarakat sekaligus juga berperan dalam membenahi sisi organisasi dan kelembagaan yang harus ada atau muncul ditengah-tengah masyarakat serta sebagai penggerak roda pembangunan di pedesaan.

4. Guna lebih mendukung peningkatan sisi perekonomian dan berbagai kegiatan masyarakat disarankan untuk meperhatikan dengan segera akan kondisi prasarana jalan desa, sarana penerangan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adelman, Irma dalam Lewis, Jhon P dan Valeriana Kallab; Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan (terjemahan); UI Press; Jakarta; 1987.
- Agus Pakpahan, Potensi Ekonomi Desa (Suatu Tinjauan Konseptual), Bahan Seminar, Lustrum ke VII, Universitas Andalas, Padang, 1989.
- Arief, Sritua' Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik; Kumpulan Karangan; UI Press; 1990.
- Bappeda dan Kantor Statistik; Kabupaten Solok Dalam Angka 1994; Kantor Statistik; Solok; 1995.
- Badan Pengembangan Swadaya Masyarakat; Studi Penjajagan Program Pengembangan Desa Pantai/Nelayan Kodya Batam Propinsi Riau; Bina Swadaya; Jakarta; 1989.
- Djoyohadikusumo, Sumitro; Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap Pelita 1969/1970-1988/1989; Centre for Policy Studies (CPS); ISEI; Jakarta; 1989
- Faisal Kasryna, Dinamika Pembangunan Pedesaan, Yayasan Obor Indonesia - PT. Gramedia, Jakarta, 1985.
- Goulet, Denis; The Cruel Choice-A New Concept in Theory of Development; Atheneum; New York; 1971.
- Hadi Prayitno, Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Liberty, Jakarta, 1985.
- Hayami, Yujiro-et al; Transformation of a Laguna Village in The Decades of Green Revolution; International Rice Research Intitute; Departement of Agricultural Economics-Argoeconomics Paper No. 89-17; 1971.
- Kantor Desa Sukoharjo; Monografi Desa Sukoharjo Tahun 1994 Desa Sukoharjo-Kecamatan Sangir, 1994.
- Kuntjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Lembaga Studi Pembangunan; Hak dan Kebutuhan Desa, seri wawasan LSP; Jakarta 1983.
- Mubyarto, Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- , Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, BPFE - UGM, Yogyakarta, 1985.

- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian; Hasil Penelitian Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya; Bogor; 1991.
- Said Rusli cs; Metodologi-Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin; Gramedia; Jakarta; 1995.
- Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan, UGM Press, Yogyakarta, 1983.
- Seer, Dudley; The Meaning of Development; Eleventh World Conference of Society for International Development, New Delhi; 1969.
- Sukanto Reksohadiputro; Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi; BPFE; Yogyakarta; 1988.
- Sukarwati, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Suparmoko; Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; PAU-UGM; Yogyakarta; 1989.
- Todaro, Michael P; Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I (terjemahan); Erlangga; Jakarta; 1991.
- The World Bank; Making Adjustment Work for The Poor; Frame work for Policy Reform in Africa; Washington DC; 1990.
- World Bank; Proverty and Hunger; Issue and Option for Food Security in Developing Countries; Washington DC, 1986.
- Zainal Abidin; Alokasi Waktu dan Produktivitas Kerja Rumah Tenaga Petani; Unibraw; 1990.